

Terus Berlanjut, BBM 1 Harga Tambah 17 Penyalur

[SAJIAN UTAMA]

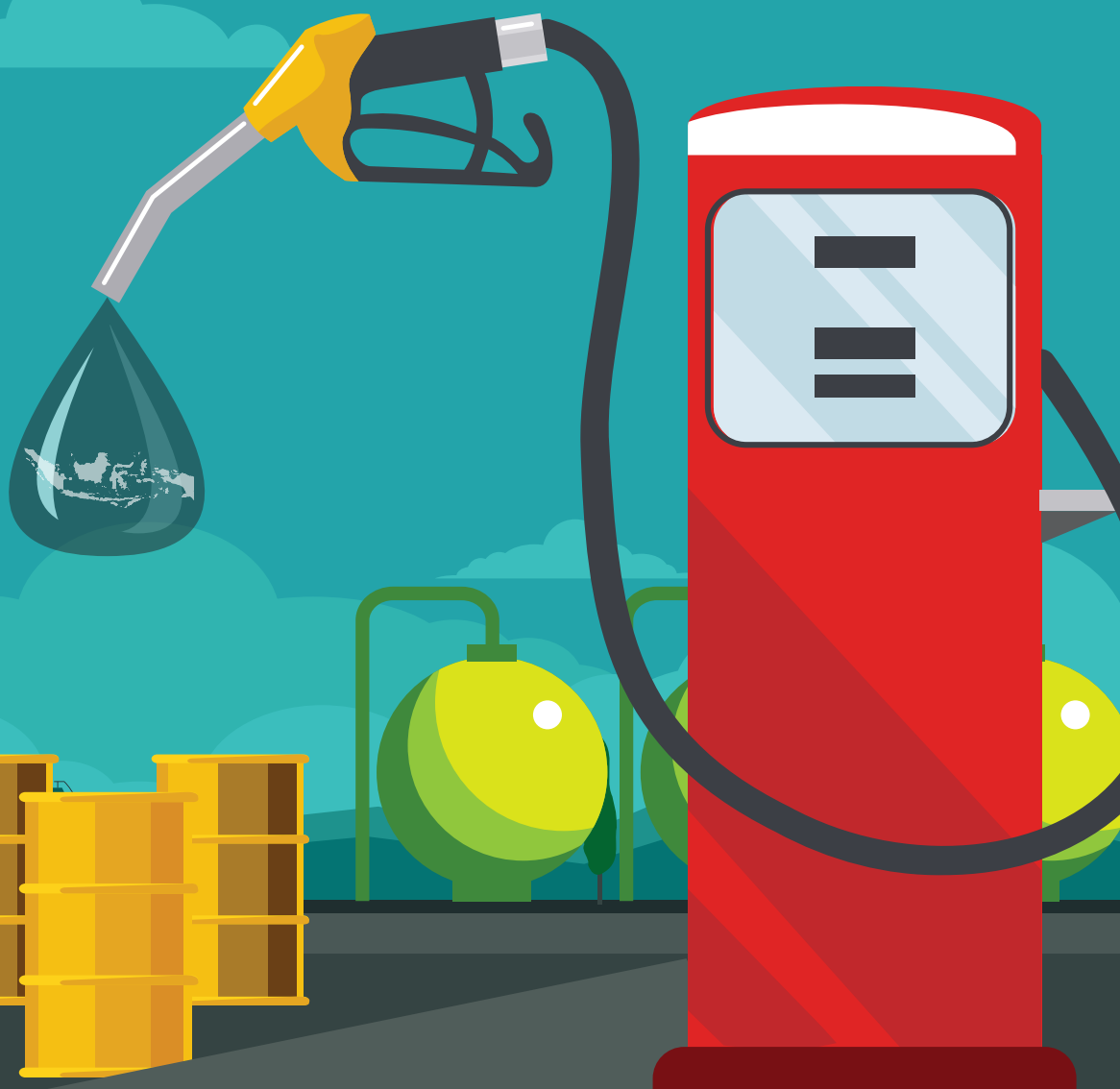
Terus Berlanjut, BBM
1 Harga Tambah 17
Penyalur

[SAJIAN UTAMA]

Pemerintah Jamin
Ketersediaan BBM

[SOROT]

Dorong Integrasi
Pertashop Demi Layanan
Lebih Optimal



BBM 1 HARGA

untuk Keadilan Bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Dalam rangka menegakkan asas keadilan, saat ini daerah terpencil pun sudah dapat menikmati harga BBM yang sama seperti di kota pada umumnya.



Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi
www.bphmigas.go.id



SAMBUTAN

Meneruskan Tongkat Estafet Kepemimpinan

Selama kurang-lebih lima tahun Komite BPH Migas periode 2017–2021 menjalankan tugas di BPH Migas. Pada pertengahan tahun ini, Komite BPH Migas periode 2017–2021 mengakhiri pengabdianya di BPH Migas seiring terpilihnya sembilan anggota Komite baru melalui seleksi Komisi VII DPR RI dan persetujuan Rapat Paripurna DPR RI.

Tongkat estafet kepemimpinan BPH Migas pun beralih ke Komite BPH Migas 2021–2025. Layaknya dunia yang sangat dinamis, BPH Migas, sebagai salah satu institusi negara pun tak luput dari dinamika. Perubahan pucuk pimpinan di BPH Migas hanya sebatas akhir dari masa tugas yang diamanatkan kepada sejumlah individu. Pergantian pucuk pimpinan BPH Migas bukanlah akhir dari perjuangan mengawasi distribusi bahan bakar minyak (BBM) dan gas bumi di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Hingga akhir masa baktinya, Komite BPH Migas periode 2017–2021 tetap menunaikan tugasnya dengan penuh pengabdian. Apa yang dicapai oleh Komite BPH Migas periode 2017–2021 hendaknya dipertahankan atau akan lebih baik lagi bisa ditingkatkan oleh Komite BPH Migas periode 2021–2025. Apa yang kurang dari Komite BPH Migas periode 2017–2021 hendaknya dapat diperbaiki oleh jajaran pimpinan BPH Migas kini.

Kami mengapresiasi dan berterima kasih kepada Komite BPH Migas periode 2017–2021 atas kinerja, pencapaian, dan pengabdianya. Kami bertekad akan meneruskan tongkat estafet kepemimpinan ini secara professional dan dengan penuh integritas demi mewujudkan Indonesia yang lebih baik ke depannya.

Redaksi menerima tulisan seputar kegiatan **Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi**.

Kirimkan ke:

Redaksional Buletin Hilir Migas

Gedung BPH MIGAS, Jl. Kapten P. Tendean No: 28 Jakarta Selatan 12710 – Indonesia, e-mail : redaksi@bphmigas.go.id
Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi, Telp : +62-21 5255500, 5212400, Fax : +62-21 5223210, 5255656

Redaksi

Diterbitkan oleh
Badan Pengatur Hilir Minyak
dan Gas Bumi

Pembina
Kepala BPH Migas

Pengarah
Komite BPH Migas

Pimpinan Umum
Sekretaris BPH Migas
Bambang Utoro

Redaktur Ahli
Direktur BBM
Patuan Alfon S

Direktur Gas Bumi
Sentot Harijady BTP

Pimpinan Redaksi
Koordinator Hukum dan Humas
Ady Mulyawan R.

Wakil Pimpinan Redaksi
Subkoordinator Humas
Daman

Redaksi Ahli
Direktur BBM, Direktur Gas Bumi

Redaksi
I Ketut Gede Aryawan, Idham Baridwan,
Sekaryawan, Bukhori Muslim, Anwar
Rofiq, Ayi Endan Harir,
Julian Ambasadur S

Editor
Ady Mulyawan R., Daman,
Narcicy Makalew, Ade Mahendra,
Josef G, Dian Puspitasari, Erna Sulastinah

Peliputan
Ade Mahendra, Sugianto, Ajipamudji
Awaludin, Imam Sofwan, Fitriya Roza,
M. Gerardo

Desain Grafis
Okto Berbudi, Yogi

Dokumentasi
Ade Mahendra, Imam Sofyan, Ajipamudji
Awaludin, M. Gerardo

Sirkulasi
Erna Sulastinah, Imam Sofyan, Ajipamudji
Awaludin, M. Gerardo

e-mail
humas@bphmigas.go.id

website
www.bphmigas.go.id

edisi 31 | 2021

HILIR MIGAS

APRIL - JUNI 2021



[SAJIAN UTAMA]

Terus Berlanjut, BBM 1 Harga Tambah 17 Penyalur

6

Kepala BPH Migas Erika Retnowati mendampingi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif saat meresmikan secara serentak 17 Penyalur BBM 1 Harga di wilayah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (3T) yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia pada hari Kamis (16/09/2021).

6 [SAJIAN UTAMA]

Terus Berlanjut BBM 1 Harga
Tambah 17 Penyalur

10 Pemerintah Jamin Ketersediaan BBM

12 [SOROT]

2022 Pembangunan Pipa Cirebon-Semarang
Akan Gunakan APBN

16 Dorong Percepatan Konversi BM ke LNG

20 [BERANDA]

Langkah Wujudkan Energi Berkeadilan
Melalui Jargas

22 [LENSA]

BPH Migas Luncurkan Buku
"Jargas untuk Rakyat"

Peringati HUT ke-18, BPH Migas Gelar
BPH Migas Goes to Sumatera

DPR Tetapkan Komite BPH Migas Baru

Kepala BPH Migas Hadiri Peresmian
27 Penyalur BBM 1 Harga

Menteri ESDM Lantik
Komite BPH Migas Periode 2021–2025

Komite BPH Migas Terima Kunjungan
Direktur Utama Pertamina

Kepala BPH Migas Serahkan Perubahan
SK JBT dan JBKP Tahun 2018–2022

Kepala BPH Migas Tinjau Pendistribusian BBM
dan LPG 3 kg di NTB

BPH Migas Gelar Sosialisasi
Kinerja dan Regulasi di Kota Solo

Gandeng PGN, BPH Migas Uji Pasar Produk Gas Kita

Bahas Perkembangan Digitalisasi SPBU,
BPH Migas-Telkom Gelar Pertemuan

BPH Migas Adakan Sosialisasi Kinerja
di Bantul

BPH Migas Gelar Sosialisasi Kinerja
di Brebes

BPH Migas Sosialisasi Aturan Pembelian Solar
di Palangkaraya

CONTENTS



10 [SAJIAN UTAMA]

Pemerintah Jamin Ketersediaan BBM

Perlahan, kasus Covid-19 di Indonesia menunjukkan tren menurun. Hal ini tak terlepas dari keberhasilan Pemerintah dalam menangani pandemi Covid-19 di tanah air. Sejumlah sektor terlihat mulai membaik. Namun, hal ini justru berdampak pada konsumsi bahan bakar minyak (BBM) yang mengalami peningkatan.

Komite BPH Migas Pantau Ketersediaan dan Distribusi BBM di Palangkaraya

Komite BPH Migas Kunjungi Terminal LNG Milik Pelindo Energi Logistik

Pastikan Ketersediaan BBM, Kepala BPH Migas Kunjungi TBBM Manggis

Bahas Kuota JBT dan JBKP, Gubernur Bangka Belitung Kunjungi BPH Migas

Komite BPH Migas Kunjungi Integrated Terminal Surabaya

BPH MIGAS Gelar Sosialisasi Kinerja di Bangka Belitung

Pantau BBM Langka, Komite BPH Migas Kunjungi Bangka Belitung

BPH Migas Gelar Sosialisasi Kinerja di Sukabumi

BPH Migas Sosialisasikan Kinerja dan Penyuluhan Regulasi di Medan

BPH Migas Adakan Sosialisasi Kinerja di Palembang

Kepala BPH Migas Kunjungi Pertamina Integrated Command Center

Perkuat Pengawasan Pendistribusian BBM dan Gas Bumi Melalui Pipa, BPH Migas Siap Bersinergi dengan BAIS TNI

BPH Migas Gelar Temu Komite



[BERANDA]

Langkah Wujudkan Energi Berkeadilan Melalui Jargas

20

Saat ini, LPG nasional nilai subsidiya sekitar Rp35 triliun, di mana 70% LPG impor. Pengembangan gas bumi pada jaringan gas rumah tangga atau sering disebut jargas dan pelanggan kecil adalah sebagai salah satu upaya mengurangi subsidi energi, khususnya LPG 3 Kg. Lebih lanjut, pengembangan jargas merupakan salah satu langkah mewujudkan energi berkeadilan.

Terus Berlanjut BBM 1 Harga Tambah 17 Penyalur

Kepala BPH Migas Erika Retnowati mendampingi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif saat meresmikan secara serentak 17 Penyalur BBM 1 Harga di wilayah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (3T) yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia pada hari Kamis (16/09/2021). Peresmian bertempat di SPBU 56.835.15, Jl. Pariwisata Aik Bukaq, Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat.





Adapun 17 titik BBM 1 Harga yang diresmikan antara lain berada di Provinsi Aceh (1 titik), Kepulauan Riau (1 titik), Nusa Tenggara Barat (1 titik), Kalimantan Barat (7 titik), Kalimantan Utara (1 titik), Kalimantan Tengah (2 titik), Sumatera Selatan (1 titik), Papua Barat (1 titik), Papua (2 titik).

Memiliki tanggung jawab

Dalam sambutan di acara peresmian, Arifin mengatakan BBM 1 Harga adalah program nyata dari Pemerintah dalam melaksanakan sila kelima keadilan sosial. Pihaknya pun menyampaikan ucapan terima kasih kepada Pertamina yang secara berangsur dan konsisten melaksanakan program ini.

"Kami harap kerja sama dengan BPH Migas, sehingga bisa ditingkatkan lagi, dan masyarakat di pelosok terutama daerah 3T bisa dapatkan BBM dengan harga wajar," jelasnya.

Kebijakan BBM 1 Harga bagi masyarakat adalah agar dapat mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor ekonomi domestik, penghematan pengeluaran BBM, dan meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat.

BPH Migas telah melakukan pencapaian program BBM 1 Harga yang dimulai sejak tahun 2017 hingga sampai 16 September 2021, yaitu telah berhasil meresmikan 297 Penyalur BBM 1 Harga di wilayah 3T.

Di sela peresmian secara serentak 17 Penyalur BBM 1 Harga di wilayah 3T, Kepala BPH Migas Erika Retnowati mengatakan, sesuai amanat dalam perundang-undangan, pihaknya mempunyai tugas untuk melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penyediaan dan pendistribusian BBM serta pengangkutan gas bumi di seluruh wilayah Indonesia. BPH Migas juga memiliki tanggung jawab untuk memastikan dan menjamin penyaluran energi terutama ketersediaan BBM yang terjangkau di seluruh pelosok negeri.

Erika menjelaskan bahwa tidak hanya upaya Pemerintah yang menggenjot pembangunan ini, juga PT Pertamina (Persero) sebagai Badan Usaha Penerima Penugasan untuk dapat mengakselerasi pelaksanaan pembangunan penyalur, sehingga target tahun 2021 dapat tercapai.

"Kami harap Pertamina untuk dapat mengakselerasi pembangunan lembaga penyalur BBM 1 Harga sehingga target kita bersama dapat tercapai," kata Erika.

Serentak di berbagai wilayah

Peresmian secara serentak 17 Penyalur BBM 1 Harga di wilayah 3T sendiri digelar di sejumlah lokasi pada hari yang sama. Komite BPH Migas Iwan Prasetya dan Abdul Halim bersama dengan Bupati Bengkayang Sebastianus Darwis dan Retail Sales Manager MORVI Pertamina Tiara





Thesaufi Harisoesyanto, misalnya, meresmikan BBM 1 Harga SPBU 66.792.01 di Kecamatan Monterado, Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat. Peresmian ini merupakan bagian dari peresmian secara serentak 17 Penyalur BBM 1 Harga di wilayah 3T.

Di dalam sambutannya, Iwan menyampaikan bahwa peresmian ini adalah bentuk nyata dari implementasi sila kelima Pancasila, yaitu Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia yang dalam hal ini diwujudkan melalui keadilan energi dan ketersediaan, kemudahan dan keterjangkauan harga BBM.

"Maka, program BBM 1 Harga ini adalah bukti begitu besarnya perhatian Pemerintah terhadap masyarakatnya," ujarnya.

Untuk wilayah Provinsi Papua, peresmian Penyalur BBM 1 Harga dilaksanakan di SPBU 86.995.25 Distrik Animha, Kabupaten Merauke juga di hari yang sama. Hadir dalam acara

peresmian tersebut, Komite BPH Migas, Yapit Sapta Putra, Wakil Bupati Kabupaten Merauke, H. Riduwan, Kapolres Merauke, AKBP Untung Sangaji dan Executive General Manager Pertamina Regional Papua Maluku Yoyok Wahyu Maniadi.

Wakil Bupati Merauke H. Riduwan mengucapkan terimakasih kepada Presiden Joko Widodo yang telah mencanangkan Program BBM 1 Harga di seluruh wilayah Indonesia serta mengapresiasi BPH Migas dan Pertamina yang telah mewujudkan SPBU BBM 1 Harga untuk masyarakat Distrik Animha.

"Kehadiran SPBU di Distrik Animha merupakan wujud sinergitas antara pemerintah daerah dan pihak swasta yang telah membuka cabangnya hingga ke distrik dan berharap dengan adanya pembangunan penyalur BBM 1 Harga ini dapat menumbuhkan ekonomi masyarakat," ungkap Riduwan.

Di tempat terpisah, Komite BPH Migas Harya Adityawarman bersama Wakil Bupati Ketapang H. Farhan serta didampingi oleh Direktur Utama SPBU 3T Desa Lalang Panjang Jimmy Irwin Rimba, dan Sales Area Manager Kalimantan Barat Wedi Surya Windrawan meresmikan BBM 1 Harga SPBU 66.788.09 di Desa Lalang Panjang, Kecamatan Pemahan, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat.

Dalam sambutannya, Harya Adityawarman menyampaikan, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri ESDM No. 36 Tahun 2016 tentang Percepatan Pemberlakuan BBM 1 Harga untuk JBT dan JBKP secara Nasional sampai 2024 akan terbangun 583 penyalur BBM 1 harga.

"Program Penyalur BBM 1 harga menjadi bukti perhatian dan keseriusan Pemerintah melalui Kementerian ESDM dan BPH Migas untuk ketersediaan energi bagi masyarakat," ujarnya.

Lebih lanjut, Harya Adityawarman berpesan kepada pemerintah daerah maupun masyarakat



setempat untuk mengawasi pemanfaatan BBM 1 harga agar tepat sasaran.

Kemudian, Komite BPH Migas Basuki Trikora Putra dan Eman Salman Arief, didampingi oleh Wakil Bupati Musi Banyuasin Beni Henerdi dan Executive General Manager Pertamina Wilayah Sumbagsel, meresmikan BBM 1 Harga di Kecamatan Plakat Tinggi Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan.

Pada kesempatan ini, Basuki Trikora Putra menyampaikan bahwa pihaknya akan berkoordinasi dengan Kepolisian, Pemkot, dan Pemkab untuk melakukan pengawasan dan menjaga energi dapat digunakan sebaik-baiknya sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Basuki Trikora Putra berharap agar Bupati Muba beserta jajarannya dapat menjaga operasional SPBU 1 Harga ini dan menjaga stoknya untuk dapat diterima oleh masyarakat yang membutuhkan.

Adanya penambahan SPBU Kompak 3T di Kecamatan Plakat Tinggi, Kabupaten Musi Banyuasin ini sangat membantu perekonomian masyarakat yang dominan bermata pencaharian buruh kayu, sawit dan karet. Masyarakat yang sebelumnya harus merogoh kocek mulai Rp9.000,-/liter hingga Rp10.000,-/liter untuk setiap pembelian BBM Solar dan Premium, sekarang dapat menikmati harga yang sama dengan di SPBU yaitu untuk Premium sebesar Rp6.450,-/liter dan Solar Rp5.150,-/liter.

Sementara itu Wakil Bupati Muba Beni Henedi mengapresiasi berdirinya SPBU BBM 1 Harga ini karena akan mendorong pertumbuhan ekonomi di masyarakat.

"Ini adalah SPBU BBM 1 Harga yang ke-3 setelah sebelumnya diresmikan di Kecamatan Lalan dan Kecamatan Babat Toman," kata dia.

Peresmian 17 titik BBM 1 Harga juga digelar di Kecamatan Kuala Behe, Kabupaten Landak, Kalimantan Barat. Di lokasi ini, Anggota Komite BPH Migas Wahyudi Anas yang didampingi oleh Bupati Landak Margaret Natasa, melaporkan bahwa SPBU 66.79304 yang berada di Kecamatan Kuala Behe, Kabupaten

Landak, Kalimantan Barat ini memang terletak di wilayah 3T.

Lokasi SPBU ini berjarak 40 KM dari Kabupaten Landak, di mana kondisinya memang di tengah-tengah perkebunan kelapa sawit. Pembangunan SPBU ini memang di tunggu-tunggu oleh masyarakat, untuk meningkatkan kemandirian ekonomi, penghematan pengeluaran BBM, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Tetapi, di SPBU ini memiliki kendala, yaitu sering terjadinya putus listrik yang mengakibatkan

terhambatnya pengoperasian SPBU. Maka dari itu, pihak pengelola menyediakan genset untuk mengantisipasi terjadinya putus listrik di tengah pengoperasian SPBU.

Semoga upaya Pemerintah menyediakan BBM untuk masyarakat benar-benar bermanfaat dan dapat meningkatkan perekonomian kebutuhan untuk masyarakat serta dapat memberikan efisiensi pada pengeluaran hariannya terkait dengan kebutuhan BBM di daerah tersebut. ★





Pemerintah Jamin Ketersediaan BBM

Perlahan, kasus Covid-19 di Indonesia menunjukkan tren menurun. Hal ini tak terlepas dari keberhasilan Pemerintah dalam menangani pandemi Covid-19 di tanah air. Sejumlah sektor terlihat mulai membaik. Namun, hal ini justru berdampak pada konsumsi bahan bakar minyak (BBM) yang mengalami peningkatan.



mbasnya, beberapa wilayah ditengarai mengalami kelangkaan BBM. Pada Sabtu (16/10/2021), misalnya, terjadi kelangkaan BBM di beberapa titik di Sumatera Utara karena ada gangguan impor. Lantaran, kapal pengangkut BBM dari Singapura dan Malaysia terlambat akibat antrean di pelabuhan.

Langkah cepat

Merespon kondisi terkini, Pemerintah menjamin ketersediaan BBM hingga ke Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di masyarakat. Kepala BPH

Migas Erika Retnowati mengungkapkannya dalam rapat koordinasi dengan Badan Usaha penerima penugasan penyaluran JBT/Minyak Solar, yaitu PT Pertamina Patra Niaga dan PT AKR Corporindo Tbk, Selasa (19/10/2021) di kantor BPH Migas untuk memastikan kebutuhan BBM di seluruh wilayah Indonesia dapat tercukupi.

Pada rapat koordinasi tersebut, PT Pertamina (Persero) menjelaskan adanya peningkatan konsumsi BBM khususnya Solar subsidi yang sejalan dengan naiknya kegiatan dan pertumbuhan ekonomi serta mobilitas masyarakat di beberapa wilayah sebagai dampak

dari keberhasilan penanganan Covid-19 oleh pemerintah dan diturunkannya level PPKM.

Sesuai UU No. 22 tahun 2001 tentang Migas, BPH Migas mempunyai tugas untuk melakukan pengaturan dan pengawasan agar ketersediaan BBM yang ditetapkan oleh Pemerintah dapat terjamin di seluruh wilayah NKRI. Dalam pengaturan ketersediaan dan distribusi BBM, BPH Migas menetapkan kuota Jenis BBM Tertentu (JBT), yaitu Solar subsidi serta Minyak Tanah dan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP), yaitu Premium untuk setiap kabupaten/kota agar BBM subsidi tepat sasaran dan tepat volume kepada masyarakat yang berhak menerima.

BPH Migas selalu melakukan langkah-langkah evaluasi dan monitoring terhadap pengaturan kuota Solar bersubsidi. Evaluasi ini dilakukan dengan melibatkan Pertamina dan AKR sebagai pelaksana di lapangan dan juga pemerintah daerah.

"Dengan perubahan pola konsumsi tersebut, BPH Migas, segera melakukan langkah-langkah dengan mengevaluasi pengaturan kuota Solar bersubsidi. Dengan mempertimbangkan berbagai hal termasuk kebutuhan masyarakat, kami telah menerbitkan surat relaksasi distribusi Solar bersubsidi, yaitu memberikan kewenangan pengaturan kuota lebih lanjut kepada PT Pertamina Patra Niaga dengan penyesuaian kuota untuk wilayah/sektor pengguna yang under dan over kuota sepanjang tidak melebihi kuota nasional 15,8 juta KL. Tentu saja pelaksanaan relaksasi ini tetap diawasi oleh BPH Migas," kata Erika dalam keterangan tertulisnya.

Dalam melakukan pengawasan, BPH Migas membuat surat edaran peruntukan BBM subsidi kepada lembaga penyalur untuk dipatuhi dan mendorong digitalisasi SPBU sebagai salah satu sarana monitoring yang dilakukan oleh Pertamina.

Sebagai informasi, peruntukan Solar bersubsidi hanya untuk transportasi darat berupa kendaraan pribadi TNKB berwarna hitam dengan tulisan putih, kendaraan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) berwarna kuning dengan tulisan hitam.

Pengecualian pada mobil barang pengangkut hasil perkebunan dan pertambangan dengan jumlah roda lebih dari enam, ambulance, mobil jenazah, pemadam kebakaran, mobil pengangkut sampah, transportasi air dengan surat rekomendasi dari SKPD terkait, sarana transportasi laut kapal berbendera Indonesia dan sarana angkutan umum berupa kapal berbendera Indonesia, pelra/perintis, sektor kereta api melalui penetapan kuota dari Badan Pengatur, usaha pertanian, usaha mikro, usaha perikanan serta pelayanan umum berupa krematorium, tempat ibadah, panti jompo, panti asuhan, rumah sakit tipe C dan D dengan surat rekomendasi dari SKPD terkait.

"Dalam melakukan pengawasan di lapangan, BPH Migas bekerja sama dengan TNI dan Polri. Kami mengucapkan terima kasih kepada aparat yang membantu penindakan penyalahgunaan Solar yang juga menjadi salah satu faktor berkurangnya Solar untuk masyarakat yang membutuhkan," lanjut Erika.

Ekonomi mulai membaik

Di tempat terpisah, Direktur Executive Energy Watch Mamit Setiawan mengatakan, kelangkaan BBM lebih disebabkan karena mulai tumbuhnya perekonomian pasca pembatasan yang dilakukan karena pandemi Covid-19.

"Patut disyukuri bahwa saat ini roda perekonomian kembali tumbuh setelah cukup lama dilakukan pembatasan oleh Pemerintah. Hal ini menyebabkan terjadinya permintaan Solar subsidi yang cukup signifikan. Sedangkan di sisi lain, Solar subsidi itu dibatasi oleh kuota yang ditetapkan oleh BPH Migas," ujar Mamit Setiawan belum lama ini.

Mamit meyakini, Pertamina, dalam hal ini sub holding Pertamina Patra Niaga (PPN), menjaga sisa kuota yang ditetapkan pemerintah dan BPH Migas cukup sampai akhir tahun 2021 ini.

"Pertamina pastinya akan menyesuaikan sisa kuota setiap provinsi agar tidak melebihi batas yang ditentukan," terangnya.

Pertamina tidak bisa serta merta menambah kuota tanpa ada persetujuan ataupun perintah dari Pemerintah dan juga BPH Migas untuk menambah jumlah Solar subsidi yang beredar.

Sebab, hal ini terkait dengan penggantian dana subsidi yang diterima oleh Pertamina.

"Kementerian ESDM, Kementerian Keuangan, dan BPH Migas harus segera bertindak cepat dengan segera menyetujui atau meminta kepada Pertamina menambah kuota Solar subsidi dan kelebihan kuota tersebut akan dibayarkan dalam APBN 2022 sehingga tidak menimbulkan kepanikan di masyarakat karena kelangkaan ini," saran Mamit.

Selain itu, Mamit juga menyampaikan bahwa kenaikan harga CPO sepanjang 2021 ini bisa menjadi penyebab ketersediaan stok BBM Solar subsidi terganggu. Hal ini disebabkan untuk BBM Solar subsidi merupakan program Solar B30.

Kenaikan harga CPO yang melejit sampai 75% jika dibandingkan tahun 2020 ikut mendorong kenaikan harga FAME sebagai bahan campuran B30 ini.

"Jadi, Pemerintah harus membuat regulasi harga atau DMO CPO untuk program biodiesel sehingga tidak menambah beban produksi bagi Pertamina jika harga FAME sedang mengalami kenaikan," terangnya.

Mamit juga memberikan usulan, saat harga FAME mengalami kenaikan, maka Pertamina bisa diberikan kelonggaran untuk menjual BBM Solar subsidi murni tanpa dicampur dengan FAME.

"Ini semua demi kelancaran mobilitas kendaraan umum serta demi membantu perekonomian yang sudah mulai tumbuh ini. Jika nanti harga FAME sudah turun, maka Pertamina wajib kembali menjual BBM Solar subsidi B30 ke masyarakat," sarannya.

Dia juga menyoroti, sampai saat ini tidak ada aturan yang jelas mengenai siapa saja yang berhak untuk menggunakan BBM Solar subsidi ini. Hal ini yang menyebabkan kuota Solar subsidi melonjak dari batas yang ditentukan.

Para pengusaha tambang, pengusaha perkebunan, mobil pribadi yang mewah semua bisa membeli Solar subsidi tanpa ada larangan yang jelas. Hanya saja, dibatasi maksimal 30 liter per hari per kendaraan. ★



2022

Pembangunan Pipa Cirebon-Semarang Akan Gunakan APBN

Titik terang kelanjutan pembangunan pipa gas bumi ruas Cirebon-Semarang (Cisem) telah ditunggu oleh banyak pihak. Pasalnya, pembangunan proyek tersebut telah terkatung-katung dalam waktu yang lama. BPH Migas sendiri berperan aktif untuk mendorong percepatan pembangunan pipa gas bumi ruas Cisem.

Salah satu langkah percepatan yang dimaksud adalah melakukan koordinasi secara intens dengan berbagai pihak terkait. Belum lama ini, misalnya, BPH Migas terus berkoordinasi dengan Kementerian ESDM terkait pembangunan pipa gas bumi ruas Cisem. Kepala BPH Migas Erika Retnowati menyampaikan dalam rapat dengan Komisi VII DPR, Senin (23/08/2021) bahwa koordinasi dengan Kementerian ESDM memang itu sudah menjadi hal yang selalu diingatkan sejak Anggota Komite BPH Migas melakukan fit and proper.

Sangat ditunggu-tunggu

"Kami melaporkan bahwa, kami sudah melakukan audiensi dengan Kementerian ESDM, tanggal 19 kemarin kami bertemu dan berdiskusi dengan Bapak Menteri ESDM (Arifin Tasrif), dan beliau sangat terbuka

mendengarkan masukan-masukan BPH Migas. Dan kami juga melaporkan secara umum terkait kinerja dan kendala-kendala, termasuk Rencana Induk Jaringan Transmisi dan Distribusi Gas Bumi Nasional (RIJTDGBN) bahwa kami belum bisa melakukan lelang karena memang belum dilakukan revisi penetapannya," ujar Erika.

"Bapak Menteri ESDM juga menyampaikan agar kami mendefinisikan kembali seperti apa wilayah jaringan distribusi yang seharusnya. Artinya sudah terbuka, dan dalam pertemuan itu juga ada Bapak Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) Kementerian ESDM, Tutuka Ariadji, beliau juga sangat mendukung untuk mempercepat revisi dari rencana induk tersebut," sambung Erika.

Pihaknya berharap mudah-mudahan ini bisa dilakukan percepatannya karena sudah

lama juga tidak berjalan. Selain itu, lanjutnya, mudah-mudahan dengan adanya komunikasi yang dilakukan BPH Migas kemarin ada progress terkait dengan Rencana Induk Jaringan Transmisi dan Distribusi Gas Bumi Nasional tersebut.

Selain itu, terang Erika, terkait dengan pembangunan Pipa Gas Bumi ruas Cisem, memang sangat ditunggu-tunggu karena industri di wilayah Batang juga sudah menunggu untuk mendapatkan pasokan gas bumi.

"Kami juga ingin mendapatkan kepastian bagaimana dengan penganggaran di APBN. Dari koordinasi kami tersebut, semula ruas pipa tersebut akan dibangun dari Cirebon-Semarang dan akan didanai oleh APBN secara utuh. Namun, hal itu akan dilaksanakan secara bertahap 2022 dan 2023," imbuhnya.

Untuk di 2022, katanya, sudah pasti didanai dengan APBN, tapi ruasnya di bagi dua, di mana yang akan didahulukan itu dari Semarang ke Batang, karena bisa dikatakan ini lebih urgent. Kemudian pembangunan pipa dari Batang ke Cirebon akan dilakukan di 2023 dan ini bisa ada opsi APBN atau dengan KPBU (Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha) dan ini belum diputuskan untuk di 2023.

"Dalam usulan anggaran BPH Migas tahun 2022, kami mengusulkan anggaran sebesar Rp1 triliun untuk pembangunan pipa ruas Semarang-Batang. Akan tetapi, Bappenas (Badan Pembangunan Nasional) menanyakan bagaimana dengan penunjukan BNBR (Bakrie And Brother) untuk pembangunan pipa gas ruas Cisem tersebut. Mereka meminta harus di-clear dulu sebelum diputuskan benar-benar ditetapkan Anggaran APBN 2022 untuk pembangunan pipa ruas Cisem fase 1 (Semarang-Batang)," paparnya.

"Untuk itu, kami berinisiatif untuk mengadakan FGD dalam waktu dekat ini

dengan mengundang Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun); Badan Pemeriksa Keuangan (BPK); Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP); Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP); Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Menteri Koordinator (Menko), Kantor Staf Presiden (KSP), banyak yang kami undang. Jadi kami ingin mendengar pendapat dari berbagai stakeholder supaya kami tidak salah langkah," lanjutnya.

Cacat hukum

Setelah FGD, terang Erika, BPH Migas juga akan meminta legal opinion kepada Jamdatun. Setelah itu nanti pihaknya sudah bisa mengambil keputusan.

Dia menjelaskan, sebetulnya dari Biro Hukum Kementerian ESDM juga sudah melakukan kajian terhadap legalitas daripada penunjukan BNBR sebagai pemenang lelang kedua.

"Menurut kajian tersebut hal itu memang cacat hukum, artinya itu tidak harus ditunjuk, karena secara aturan, aturan yang digunakan untuk menunjuk itu aturan tahun 2019 dan itu tidak bisa berlaku surut. Kemudian, kondisi pada saat dilakukan lelang pada 2006, tentunya kondisi itu sangat jauh berbeda dengan kondisi saat ini, sehingga tindak mungkin diterapkan kondisi 2006 di bawa ke 2021," ujarnya.

Lebih jauh, ia mengatakan bahwa penunjukan tahun 2006 itu bisa dilakukan manakala pemenang pertama mundur pada saat dia ditunjuk sebagai pemenang lelang. Artinya belum pada saat melakukan pengerjaan.

"Sebetulnya kajian-kajian itu sudah kami pelajari, akan tetapi kami butuh penguatan untuk mengambil keputusan, terutama agar APBN bisa digunakan di tahun 2022. Kami harap di bulan September sudah ada legal opinion dari Jamdatun dan kita bisa membuatkan satu surat pembatalan. Sehingga Anggaran APBN 2022 bisa disetujui

Ilustrasi : Pipa Gas



Ilustrasi - Pipa Gas



secara penuh oleh Bappenas dan tentunya akan dibahas dengan Komisi VII DPR," tandasnya.

Penunjukan BNBR tahun lalu itu karena PT Rekayasa Industri (Rekind) yang menjadi pemenang lelang proyek tersebut pada 2006 lalu tidak juga menyelesaikan pembangunannya setelah 15 tahun berjalan.

Setelah 15 tahun proyeknya mangkrak, Rekind pun mengundurkan diri. Sedangkan BNBR merupakan pemenang kedua dalam lelang 2006 lalu. Karena itulah, BPH Migas yang dikepalai Fanshurullah Asa tahun lalu menunjuk BNBR melanjutkan proyek tersebut.

Beberapa alasan mengapa kajian dari Kementerian ESDM tentang penunjukan BNBR catat hukum karena beberapa pertimbangan. Pertama, kondisi keekonomian saat proyek tersebut dilelang 2006 sangat berbeda dengan sekarang.

Kedua, penunjukan pemenang kedua (BNBR) bisa dilakukan manakala pemenang pertama (Rekind) mundur pada saat dia ditunjuk pada 2006, di saat pengerjaan proyek belum dilakukan. Faktanya, Rekind sudah memulai proyek tersebut, meski tak kunjung selesai hingga 15 tahun lamanya.

"Artinya penunjukan ini (BNBR) tidak pas, harusnya kalau Rekind mundur saat ditunjuk (2006) dan belum lakukan pekerjaan, itu bisa. Tapi kan Rekind sudah menyanggupi dan groundbreaking, kemudian mundur. Nah ini tidak bisa lagi selain aturan yang digunakan aturan 2019 yang tdk berlaku surut," kata Erika.

Sebagai pengurus BPH Migas yang baru, Erika mengatakan pihaknya sudah mempelajari kajian Kementerian ESDM ini dan butuh penguatan lagi dari berbagai pihak, termasuk memastikan proyek Pipa Cisem akan menggunakan APBN tahun depan.

Yang jelas, bila proyek pipa gas Cisem terus tertunda, maka akan mempengaruhi kemanfaatan dari infrastruktur tersebut bagi masyarakat. Sementara itu, masyarakat

dan dunia usaha sebagai konsumen sangat membutuhkan jaminan kepastian pasokan gas dari pipa tersebut.

Di tempat terpisah, Direktur Pusat Kebijakan Publik (Puskepi) Sofyano Zakaria berujar, "Pembangunan pipa gas Cisem akan lebih bermanfaat bagi kepentingan distribusi gas buat kepentingan masyarakat banyak, karena

itu seharusnya ini dibiayai dengan dana APBN ketimbang menggunakan dana pihak swasta".

Menurut Sofyano, jika proyek pipa gas dibiayai lewat APBN, maka sesuai posisinya pemerintah akan lebih mengutamakan kepentingan banyak orang daripada sisi bisnisnya jika dibiayai oleh swasta.

Pendapat serupa disampaikan Direktur Energy Watch Mamit Setiawan. Ia menilai, "Meningkat dampak bergandanya yang besar, ada baiknya proyek itu diambil alih Pemerintah dan dibiayai dengan dana APBN". ★





Dorong Percepatan Konversi BBM ke LNG

BPH Migas bersama PT Kereta Api Indonesia (Persero) (KAI) dan PT PGN LNG menggelar pertemuan di Kantor Pusat KAI di Bandung, Senin (24/05/2021). Pertemuan ini diadakan dalam rangka mempercepat konversi BBM ke LNG untuk kereta api.

Hadir dalam pertemuan tersebut antara lain Kepala BPH Migas M. Fanshurullah Asa, Anggota Komite BPH Migas Ahmad Rizal bersama tim, Direktur Prasarana PT KAI (Persero) Awan Hermawan Purwadinata, dan Corporate Deputy Director Logistic Suparno, dan VP Engineering PT PGN LNG Andri Oscarianto Ginting.

Dimulai pada tanggal 10 Agustus 2021
Pertemuan tersebut menghasilkan kesepakatan

bahwa 10 Agustus 2021 konversi BBM ke LNG resmi dimulai. Dalam kesempatan itu, Ifan, sapaan akrab Fanshurullah Asa, berharap kerja sama antara BPH Migas, KAI, dan PGN LNG semakin solid ke depannya. Menurutnya, dalam sinergitas ini, PGN berperan penting karena membangun storage LNG container maupun isotank untuk penyimpanan.

Bersama-sama, BPH Migas, KAI, dan PGN LNG memikirkan kepentingan nasional melalui upaya



mengurangi penggunaan subsidi. Kuota 1 juta KL BBM selama ini diberikan untuk non transportasi mobil kendaraan darat. Artinya, 1 juta KL itu untuk kereta api dan kapal laut. Jadi, dibutuhkan ide-ide kreatif, termasuk untuk konversi dari BBM subsidi ke LNG.

"Ini amanah sesuai UU Migas Pasal 8 dan 46 untuk memaksimalkan gas bumi bagi kepentingan dalam negeri," ujar Ifan.

Ifan meneruskan, sudah banyak negara yang menggunakan LNG untuk lokomotif kereta api, seperti Amerika Serikat (AS), Rusia, Kanada, dan India. Ia meyakini, Indonesia juga bisa seperti negara-negara tersebut.

BPH Migas memiliki kesungguhan komitmen untuk konversi ini segera diwujudkan. Setidaknya, untuk penerangan gerbong dahulu sambil berproses untuk lokomotif. Kalau perlu, lakukan benchmark ke negara-negara yang telah menerapkannya.

Sementara itu, Suparno menerangkan, uji coba saat ini baru sebatas genset penerangan. Pihaknya akan terus mengupayakan pengembangannya, seperti untuk gerbong dan lokomotif.

"Covid-19 mengubah mindset, mengarah ikhtiar efisiensi. Ini adalah hikmah yang kita dapatkan. Ekonomi harus hidup. Tapi, penyebaran virus harus berhenti," ujarnya.

Yang perlu pertimbangan, jika sudah berhasil diaplikasikan, pasti akan ada ruang (space) penempatan di lokomotif. Ini tentu menjadi bahan pertimbangan juga terkait ruang termanfaatkan untuk sektor lain berkurang. Hal ini pun terkait perhitungan komersialisasi.

Pada kesempatan sama, Ahmad Rizal menegaskan pentingnya kepastian PKS dimulai. Tujuannya agar jelas tanggung jawab masing-masing dan terukur perkembangannya. Hal ini karena terkait dengan berbagai aspek, misalnya penyiapan material, keselamatan dan lain-lain.

Merangkul banyak pihak

Sebelum pertemuan di atas, BPH Migas menginisiasi pertemuan secara daring antara konsumen pengguna jenis BBM Tertentu, seperti Solar subsidi untuk kereta api dan transportasi laut, dengan PGN LNG dan PT Pertagas Niaga, Rabu (28/04/2021). Pertemuan itu untuk mempercepat terwujudnya konversi BBM ke LNG dengan harapan akan segera terlaksananya pilot project konversi ke LNG baik untuk moda transportasi kereta api maupun kapal.

Dalam sambutannya, Ifan menyampaikan bahwa BPH Migas sengaja mengundang para pelaku transportasi dan asosiasi untuk dipertemukan dengan PGN LNG dan Pertagas Niaga. Para pelaku transportasi dan asosiasi yang diundang itu antara lain KAI;

PT ASDP Indonesia Ferry (Persero); PT Pelni (Persero); Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (GAPASDAP); Indonesia National Ferry Owners Association (INFA); dan Indonesian National Shipowners' Association (INSA).

Pertemuan dimaksudkan sebagai mediasi supaya ada percepatan konversi energi dari BBM subsidi ke LNG. Hal ini penting dalam rangka mencari solusi membantu negara dalam mengurangi subsidi BBM.

Menurut Ifan, berdasarkan data yang ada di BPH Migas penggunaan BBM subsidi saat ini untuk konsumen transportasi baik kereta api dan transportasi laut mencapai 1 juta KL.

"Jika ini bisa secepatnya kita lakukan konversi ke LNG sama saja membantu negara mengurangi subsidi, juga mengurangi pemanasan global, mengurangi polusi, mengurangi impor sehingga devisa bisa dihemat," jelas Ifan.

Ifan menjelaskan, dalam dua tahun terakhir juga karena kondisi pandemi Covid-19, konsumsi LNG di internasional mengalami penurunan yang membuat banyak kontrak kargo LNG Indonesia tidak terserap sehingga akan dijual melalui market spot ke luar negeri.

Oleh sebab itu, agar LNG ini dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan dalam negeri, maka perlu ditingkatkan pasar pengguna gas di dalam negeri. Selain untuk pembangkit dan industri, juga perlu didorong pada sektor transportasi.

Lebih lanjut Ifan menyampaikan BPH Migas sudah melakukan kerja sama dengan perguruan tinggi, seperti Universitas Indonesia, Institut Teknologi Bandung, Universitas Gadjah Mada dan yang lainnya. Kerja sama untuk membuat pengaturan agar ritel LNG berbasis isotank kontainer bisa ditata tarif penyalurannya, regassifikasi dan sebagainya sehingga para pihak bisa mendapatkan harga yang affordable serta adil untuk semua pihak.

Mendapat dukungan dari pelaku industri Pada pertemuan yang sama, Direktur

Utama PT PGN LNG Indonesia Jeffry Hotman menyampaikan bahwa PGN LNG berkomitmen untuk memberikan performance & benefit yang baik dalam penyediaan LNG. Menurutnya, dari segi infrastruktur serta storage sangat memungkinkan untuk menjadi supply point.

Saat ini, PGN LNG tengah melakukan kajian teknis dan pertukaran informasi terkait kerja sama dalam project konversi BBM ke LNG dengan KAI. Aspek teknis dari project ini adalah konverter kit yang sangat spesifik sehingga terus dilakukan pengembangan.

Diharapkan, Agustus 2021 dapat diimplementasi untuk uji performance penggunaan LNG di kereta api. Lalu, pada

bulan September 2021 diharapkan diperoleh data untuk dilakukan pembahasan lebih lanjut terkait komersialisasi.

Sementara itu, Presiden Direktur PT Pertagas Niaga Linda Sunarti menyampaikan, pihaknya siap untuk memberikan support terkait penyediaan dan supply LNG untuk sektor transportasi jika akan melakukan konversi BBM ke LNG. Pertagas Niaga juga telah memiliki infrastruktur yang mendukung pola supply LNG di Indonesia.

Meski demikian, infrastruktur Pertagas Niaga saat ini masih dedicated untuk sektor listrik dan industri. Namun, tidak menutup kemungkinan untuk pemanfaatan dan pengembangan infrastruktur baru untuk sektor transportasi.

CDD Infrastructure Maintenance PT KAI Junaidi N, dalam pertemuan itu, menyebutkan bahwa pihaknya mengharapkan dalam konversi ke LNG akan memberikan biaya yang lebih ekonomis daripada BBM.

Kemudian, Direktur Utama PT ASDP Ira Puspadewi menyampaikan, MoU dengan PGN LNG perlu diperbarui namun telah dilakukan survei bersama dengan PGN LNG terhadap mesin pembangkit yang dapat dilakukan uji coba untuk aplikasi alat konversi LNG di Merak-Bakaheuni. ASDP juga mengharapkan harga LNG yang kompetitif, memiliki accessibility secara teknis dan supply hingga bantuan teknologi konversi serta kebijakan pendukung.





Lain halnya Pelni yang menyoroti perlu ada kajian dari segi safety dan efisiensi LNG untuk rute pelayaran penumpang jarak jauh. Pelni menyebut juga perlu dilakukan kajian lebih lanjut dan benchmarking terkait efisiensi konversi ke LNG untuk kapal penumpang.

Terkait konversi BBM ke LNG, BPH Migas berinisiatif untuk menawarkan dan mendorong rencana konversi pemakaian BBM Subsidi ke LNG dengan isotank sebagai bahan bakar sektor transportasi, khususnya kereta api dan transportasi laut.

BPH Migas berwenang untuk dapat mengusulkan pemanfaatan LNG dalam negeri serta melakukan pengaturan dan pengawasan atas kegiatan usaha pengolahan

regasifikasi LNG, pengangkutan, penyimpanan, dan niaga LNG berdasarkan Izin Usaha.

Hal itu sebagaimana diamanatkan UU No. 22 Tahun 2001 tentang Migas dan berdasarkan Keputusan Menteri ESDM Nomor 1088 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembinaan, Pengawasan, Pengaturan, dan Pengendalian Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi dan Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi. ★



Langkah Wujudkan Energi Berkeadilan Melalui Jargas

Saat ini, LPG nasional nilai subsidiya sekitar Rp35 triliun, di mana 70% LPG impor. Pengembangan gas bumi pada jaringan gas rumah tangga atau sering disebut jargas dan pelanggan kecil adalah sebagai salah satu upaya mengurangi subsidi energi, khususnya LPG 3 Kg. Lebih lanjut, pengembangan jargas merupakan salah satu langkah mewujudkan energi berkeadilan.

BPH Migas terus berupaya untuk mengembangkan pemanfaatan jargas ke berbagai wilayah Indonesia. Upaya tersebut, misalnya, terlihat saat BPH Migas menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) penyaluran gas bumi pada jaringan gas rumah tangga dan pelanggan kecil di wilayah Sumatera Selatan (Sumsel). Kegiatan yang berlangsung di Hotel Novotel Palembang, Senin (31/05/2021) ini, dihadiri oleh perwakilan dari delapan kabupaten/kota di Sumsel yang memiliki jaringan gas. Selain itu, acara ini juga diikuti oleh para pelaku industri terkait jargas, yakni PT PGN (Persero), PT Pertagas Niaga, Perusda Sarana Pembangunan Palembang Jaya, dan Perusda Petro Prabu.

Hadir memberikan pengarahan Anggota Komisi VII DPR RI Yulian Gunhar, Kepala BPH Migas M. Fanshurullah Asa, dan Komite BPH Migas bidang pengawasan sekaligus wilayah koordinasi Sumbagsel Ahmad Rizal.

Tidak tergantung APBN

Dalam sambutannya, Ifan, sapaan akrab Fanshurullah Asa menyampaikan bahwa Sumatera Selatan adalah salah satu provinsi yang memiliki kegiatan usaha pengangkutan dan niaga gas bumi melalui pipa serta jaringan gas bumi untuk rumah tangga dan pelanggan kecil.

“Saat ini, di Sumatera Selatan terdapat jaringan gas untuk rumah tangga dan pelanggan kecil sebanyak 127.078 Sambungan Rumah (SR), dengan jumlah yang sudah terutilisasi sebanyak 98.738 SR. Ke depan, masih banyak potensi besar untuk jargas di Provinsi Sumatera Selatan yang bisa digarap.” ungkapnya.

Hal ini dapat dilihat dari ketersediaan suplai gas yang besar, infrastruktur migas yang memadai, dan ketersediaan pasar yang potensial. Saat ini, Prabumulih memiliki jaringan gas tertinggi di Indonesia, ada sekitar 44 ribuan sambungan rumah dan sudah terlaksana sebesar 95%. BPH Migas akan mendukung kabupaten dan kota lainnya di Sumatera Selatan untuk segera menggarap jargas.

Lebih Lanjut, Ifan menyampaikan bahwa saat ini sudah terbit Peraturan Presiden No. 6 Tahun 2019. Aturan tersebut menyebutkan, penyediaan dan pendistribusian gas bumi melalui jaringan transmisi dan distribusi gas bumi untuk rumah tangga dan pelanggan kecil bukan hanya dilaksanakan oleh BUMN Migas melalui penugasan Pemerintah, tapi dapat juga oleh BUMD, swasta, dan koperasi. Jadi, bisa bentuk investasi sehingga tidak tergantung APBN yang terbatas.

“Dalam RPJMN 2020-2024, Pemerintah menargetkan pembangunan jargas sejumlah

4 juta sambungan rumah. Hari ini baru 530.000-an, masih kisaran 3,5 juta sambungan yang diperlukan. Artinya, jika pola APBN berarti masih diperlukan kisaran Rp35 triliun untuk menggarap 3,5 juta sambungan jargas tersebut. Maka, dengan pola investasi akan meringankan anggaran Pemerintah, sekaligus menumbuhkan iklim usaha,” lanjut Ifan.

Selalu lebih rendah daripada LPG 3 kg

Pemerintah, melalui BPH Migas, akan terus berupaya menyejahterakan rakyat dengan penggunaan Jargas. Salah satunya melalui tugas BPH Migas di dalam Undang-Undang Migas No. 22 Tahun 2001 Pasal 46 ayat (3) huruf e, yakni meliputi pengaturan dan penetapan mengenai harga jual gas bumi untuk konsumen Rumah Tangga (RT) dan Pelanggan Kecil (PK) dengan mempertimbangkan kemampuan dan daya beli masyarakat.

Penetapan harga Jargas ini bersumber dari mekanisme APBN dan juga non APBN. BPH Migas telah menetapkan harga jargas yang selalu lebih rendah daripada harga LPG 3 kg. Rata-rata, penetapan harga jargas untuk Rumah Tangga-1 (RT-1) untuk wilayah Sumatera Selatan adalah sebesar Rp4.250,-/m³ lebih rendah dari harga pasar LPG 3 kg sebesar Rp5.651,-/m³. Sedangkan rata-rata penetapan harga jargas untuk RT-2 sebesar Rp6.000,-/m³ lebih redah daripada harga



pasar LPG 12 kg yang mencapai sebesar Rp10.010,-/m3.

"Dengan terbitnya Peraturan BPH No.4 Tahun 2021 tentang Penetapan Harga Gas Bumi untuk Rumah Tangga dan Pelanggan kecil (pengganti peraturan BPH No. 22 Tahun 2011), ketentuan dalam Peraturan BPH Migas No. 22/P/BPH Migas/VII/2011 tentang besaran harga RT-2 = 2x RT-1 telah dihapuskan dengan tujuan agar lebih memberikan ruang (scale up) kepada Badan Usaha (BU) dalam mencapai keekonomian pengelolaan Jargas melalui penghapusan batasan harga (capping price)," jelasnya.

Di sisi lain, Ifan menambahkan, BPH Migas tidak mengambil iuran Badan Usaha yang melakukan kegiatan penyaluran gas Jargas untuk RT-2 dan PK-2 sebagaimana lazimnya diberlakukan terhadap Badan Usaha yang melaksanakan kegiatan penyaluran gas bumi untuk pipa transmisi dan kepentingan niaga industri.

Menurut Ifan, dari 502.585 SR yang telah terpasang dengan sumber dana APBN, berdasarkan pengawasan BPH Migas, ditemukan laporan bahwa yang tidak terutilisasi (tidak terpakai) jargas tersebut sekitar 108.000 SR. Itu tidak terpakai dengan berbagai alasan di lapangan. Dengan kata lain, dana APBN yang sudah dianggarkan tidak bermanfaat dengan baik dan masyarakat masih menggunakan LPG 3 Kg. Artinya, masih menggunakan subsidi Pemerintah.

"Dengan adanya 108.000 SR yang tidak terutilisasi itu, maka ada potensi Rp2 triliun dari APBN yang tidak terpakai (lost opportunity)," papar Ifan.

Pada kesempatan sama, Yulian Gunhar mendorong pemerintah daerah untuk memanfaatkan jargas. Jangan sampai, jaringan gas yang telah tersedia terbengkalai sebab harganya lebih murah dibandingkan dengan LPG tabung 3 kg. Bila ada masalah, maka urailah dan carilah solusinya.

"Kabupaten/kota yang belum, segera manfaatkan jargas," pesannya.

Pada acara tersebut, Ahmad Rizal menganjurkan agar komunikasi dengan Ditjen Migas Kementerian ESDM ditingkatkan, inventarisasi jenis pelanggan, data konsumen sesuai kelasnya sehingga income daerah meningkat. Ia juga menyarankan untuk bisa memindahkan meter sesuai kondisi, termasuk pemindahan aset ke Badan Usaha. Rizal memcontohkan di Jawa Tengah, Pertamina bisa menerima pelimpahan aset pipa 8 inci sepanjang belasan km.

Peran penting pemerintah daerah Sesi dialog berlangsung menarik, wakil dari kabupaten/kota masing-masing menyampaikan kondisi riil di daerahnya, termasuk kondisi di mana instalasi terpasang, tetapi jaringan distribusi belum ada. Sebaliknya, ada juga yang aliran gas kondisi terlalu kecil sehingga tidak mencapai

titik nyala kompor. Di samping itu, ada juga sebagian masyarakat yang takut menggunakan jargas.

Prabumulih bisa menjadi contoh dalam penerapan jargas. Dari awal, BUMD dilibatkan untuk investasi jargas. Lembaga eksekutif dan legislatif juga duduk bersama-sama mengatasi masalah, termasuk masalah galian timbunan sebagai risiko pengerjaan jargas. Lalu, sosialisasi kepada masyarakat dilakukan jauh-jauh hari.

Walikota Prabumulih Ridho Yahya menyatakan bahwa yang terpenting adalah komitmen kepala daerah masing-masing. Hal ini karena pemasangan jargas menyangkut soal penggalian- penggalian dan ganti rugi. Ridho juga menekankan perlunya aksi konkret untuk meminimalisir potensi terjadinya masalah.

"Agar jangan ada anggapan penghasil tidak menikmati hasil," ujarnya.

Pada intinya, kinerja BPH Migas dalam jargas ini tak lepas dari upaya mendukung pemerintahan saat ini yang tengah melakukan upaya percepatan pembangunan infrastruktur jargas agar ketersediaan energi dapat diakses oleh masyarakat kecil secara langsung sebagai iktiar mewujudkan energi yang berkeadilan. ★

BPH Migas Luncurkan Buku “Jargas untuk Rakyat”

Menyambut hari jadi ke-18, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas (BPH Migas) menerbitkan sebuah buku berjudul “Jargas untuk Rakyat”. Buku ini mengupas peran BPH Migas dalam mengembangkan jaringan gas untuk rumah tangga (jargas) Rumah Tangga (RT) dan Pelanggan Kecil (PK).

Bertepatan dengan tanggal 13 Mei 2021, BPH Migas telah berusia 18 tahun (2003-2021). Tak hanya menjadi bagian peringatan HUT BPH Migas ke-18, peluncuran buku tersebut merupakan karya rutin tiap tahunnya, khususnya pada periode Komite 2017–2021. Pada tahun lalu, BPH Migas menerbitkan buku yang berjudul “BBM 1 Harga, Keadilan Energi untuk Masyarakat 3T di NKRI”. Setahun sebelumnya, buku berjudul “Bunga Rampai Tata Kelola Hilir Migas” diterbitkan.

“Syukur alhamdulillah, telah terbit buku terkait tentang apa dan bagaimana mengenai jargas Rumah Tangga dan Pelanggan Kecil dengan peran BPH Migas di dalamnya, khususnya penetapan harga jargas. Buku ini adalah kado ulang tahun BPH Migas ke-18 sekaligus sebagai bentuk tradisi intelektual di lembaga ini”, kata Kepala BPH Migas M. Fanshurullah Asa mengomentari peluncuran buku yang bekerja sama dengan PT Dharmapena Citra Media ini.

Secara gamblang dan lugas terkait gas nasional yang dimulai dari sejarah gas bumi, penerapan dan pembangunan jargas hingga eksistensi serta kinerja BPH Migas dalam mengembangkan jargas dengan konsep untuk energi berkeadilan dipaparkan di buku ini. Karena salah satu tugas BPH Migas diperkuat di dalam Undang-Undang Migas No. 22 tahun 2001 di mana BPH Migas mempunyai

wewenang untuk menetapkan toll fee jaringan transmisi, menetapkan harga gas bumi untuk Rumah Tangga dan Pelanggan Kecil.

“Termasuk harga jargas yang bersumber dari mekanisme APBN, dan juga non APBN di mana BPH Migas telah menetapkan harga gas yang sampai saat ini selalu lebih rendah dari harga LPG 3 Kg,” tegas Kepala BPH Migas yang juga pembina dalam penerbitan buku ini. Selain itu, sekaligus upaya membuka ruang akselerasi jargas bukan hanya di daerah yang menghasilkan gas, namun juga strategi menyiasati dengan peluang membangun storage dan penyiapan isotank serta membangun jaringan distribusi dengan fasilitas penggunaan isotank LNG untuk kebutuhan gasnya. Dalam buku ini, dipaparkan pula soal perbandingan harga antara jargas dan LPG yang jelas sangat jauh berbeda. Jargas lebih murah, aman, bersih, dan nyaman. ★

BPH MIGAS

JARGAS UNTUK RAKYAT

LEBIH MURAH, AMAN, DAN BERSIH

KINERJA BPH MIGAS UNTUK ENERGI BERKEADILAN

*“Harga Jargas di 57 Kabupaten/Kota dengan jumlah 502.585 Sambungan Rumah (SR), ditetapkan oleh BPH Migas dengan harga **LEBIH MURAH** dari gas LPG 3 Kg.”*

M. Fanshurullah Asa

Peringati HUT ke-18, BPH Migas Gelar BPH Migas Goes to Sumatera



Menjadi bagian dalam memperingati hari jadi ke-18, BPH Migas menggelar BPH Migas Goes to Sumatera. Kegiatan ini juga ditujukan guna mengawasi ketersediaan dan distribusi BBM di bulan Ramadhan dan hari raya Idul Fitri 1442 H, khususnya di Pulau Sumatera.

Setelah 13 hari melakukan perjalanan darat, Tim BPH Migas Goes to Sumatera telah sampai kembali di Jakarta, Sabtu dini hari (15/05/2021). BPH Migas Goes to Sumatera dimulai pada tanggal 4 Mei 2021. Bertolak dari Jakarta, rute Goes to Sumatera secara berturut-turut adalah Lampung, Palembang, Sorolangun, Kerinci, Bukit Tinggi, Parapat, Samosir, Meulaboh, Aceh Selatan dan tiba di Banda Aceh pada 10 Mei 2021.

Setelah sampai di provinsi ujung barat Indonesia, perjalanan pengawasan ketersediaan dan distribusi dilanjutkan kembali melewati Biereun, Lhokseumawe menuju Medan, Pekanbaru, Jambi, Palembang serta melewati penyeberangan Bakauheni-Merak. Akhirnya, pada tanggal 15 Mei 2021, pukul 00.15, Tim BPH Migas

Goes to Sumatera tiba kembali di kantor BPH Migas, Jl. Pierre Tendean No. 28, Jakarta Selatan.

Kedatangan Tim BPH Migas Goes to Sumatera disambut langsung oleh Kepala BPH Migas M. Fanshurullah Asa yang sebelumnya turut serta dalam perjalanan darat dari Jakarta hingga Aceh. Namun, berhubung ada tugas lainnya, maka Ifan, sapaan akrab Fanshurullah Asa, kembali terlebih dahulu ke Jakarta. Turut hadir juga Sekretaris BPH Migas Bambang Utoro dan Direktur BBM BPH Migas Patuan Alfon S.

Ifan menyampaikan bahwa perjalanan BPH Migas Goes to Sumatera memakan waktu 134 jam kendaraan dengan jarak tempuh lebih dari 5.500 km.

"Saya sebagai Kepala BPH Migas salut dan bangga dengan mental dan kekompakan Tim BPH Migas," ujar Ifan.

Dirinya juga bersyukur tim telah sampai kembali dengan selamat. Ia melanjutkan, turun langsung ke lapangan seperti BPH Migas Goes to Sumatera ini sekaligus pematangan dari hasil pelatihan character

building di Pusdiklatpassus Kopassus Batujajar beberapa waktu lalu. Ifan berharap semoga ke depan perjalanan seperti ini, turun langsung ke lapangan melihat realita yang sesungguhnya di lapangan serta mengatasi masalah terkait tuisi BPH Migas, bisa dilakukan di daerah lain juga. Dengan begitu, manfaat eksistensi BPH Migas untuk menjamin ketersediaan dan distribusi migas di seluruh wilayah NKRI semakin nyata.

Ifan menambahkan selama 18 tahun baru kali ini dilaksanakan perjalanan darat keliling Sumatera terkait tuisi BPH Migas dalam Pengawasan BBM.

"Saya sampaikan terima kasih kepada teman-teman Pertamina MOR 1 dan 2, SAM maupun SBM wilayah yang dilewati, yang dengan tulus membantu dan mendukung kegiatan ini, juga bantuan kelancaran dari ASDP Bakauheni dan Merak, sangat berarti untuk suksesnya Posko BPH Migas Goes to Sumatera, dalam rangka pengawalan distribusi dan ketersediaan BBM di bulan Ramadhan dan hari Raya Idul Fitri 1442 H," pungkasnya. ★

DPR Tetapkan Komite BPH Migas Baru

Komisi VII DPR RI resmi menetapkan sembilan nama sebagai Kepala dan Anggota Komite BPH Migas periode 2021–2025. Kesembilan nama tersebut merupakan hasil seleksi Uji Kepatutan dan Kelayakan (Fit and Proper Test) yang berlangsung pada 28–30 Juni 2021.

Dalam siaran pers usai menghadiri penyelenggaraan Fit and Proper Test tersebut di Gedung MPR-DPR RI, Jakarta, Rabu (30/06/2021), Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eddy Soeparno menyatakan Erika Retnowati ditetapkan Komisi VII DPR RI menjadi Kepala BPH Migas periode 2021–2025. Erika terpilih dari total 18 calon Komite BPH Migas yang diajukan Presiden.

“Uji Kepatutan dan Kelayakan atau Fit and Proper Test untuk Calon Kepala dan Anggota

Komite BPH Migas telah rampung dan sudah ada nama-nama komite BPH Migas yang baru dengan Kepala BPH Migas terpilih, yakni Erika Retnowati. Sekaligus, sebagai sejarah baru karena untuk pertama kalinya BPH Migas dipimpin oleh sosok wanita. Kita membuat sejarah dengan memilih Kepala BPH Migas wanita pertama,” ujar Eddy.

Politisi Fraksi PAN tersebut menuturkan, selain menunjuk Erika Retnowati sebagai Kepala BPH Migas, Komisi VII DPR RI juga telah menunjuk delapan anggota BPH Migas baru.

Komisi VII DPR RI telah melakukan proses Uji Kepatutan dan Kelayakan terhadap calon Ketua dan Anggota Komite BPH Migas periode 2021–2025 total kepada 17 calon anggota. Awalnya, direncanakan sebanyak 18 calon anggota yang mengikuti Fit and

Proper Test tersebut. Namun, satu calon yang sedianya akan mengikuti, yakni Ferdi Novianto, telah tutup usia.

Erika sendiri menggantikan Kepala BPH Migas sebelumnya, yakni M. Fanshurullah Asa yang memasuki masa pensiun. Sebelumnya, wanita kelahiran Mataram 20 Juli 1963 itu menjabat sebagai Kepala Biro Keuangan Kementerian ESDM sejak tahun 2015. Selain itu, Erika memiliki pengalaman sebagai akuntan pada Deputy Pegawai Instansi Pemerintah Bidang Perekonomian, BPKP Tahun 1992–2001. Jabatan lain yang pernah diembannya adalah ajun akuntan pada Deputy Pengawasan tahun 1985–1988. ★



Kepala BPH Migas Hadiri Peresmian 27 Penyalur BBM 1 Harga

Kepala BPH Migas M. Fanshurullah Asa turut menghadiri peresmian 27 Penyalur (SPBU) BBM 1 Harga secara serentak bertempat di TBBM Siantan, Pontianak, Kalimantan Barat, Rabu (09/06/2021). Dengan penambahan 27 penyalur BBM 1 Harga ini, maka total ada 280 SPBU BBM 1 Harga, di mana sebelumnya hingga akhir tahun 2020 telah diresmikan sebanyak 253 Penyalur BBM 1 Harga di wilayah 3T (terdepan, terluar, dan terpencil).

Kepala BPH Migas dalam sambutannya menyampaikan bahwa penjangkauan wilayah 3T dengan BBM 1 Harga adalah upaya mewujudkan keadilan energi. Dengan kehadiran BBM 1 Harga, diharapkan ekonomi bisa digerakkan di level daerah. Hal ini merupakan salah satu bagian dari Nawacita Presiden Joko Widodo yang menginstruksikan agar pembangunan dimulai dari pinggiran.

Penambahan penyalur BBM 1 Harga untuk jenis BBM tertentu dan khusus penugasan nasional dipastikan akan memudahkan masyarakat dalam mengakses kebutuhan energi, terutama di wilayah 3T. BBM 1 Harga juga merupakan wujud energi berkeadilan bagi seluruh masyarakat.

"Ini sekaligus merupakan pembangkitan ekonomi, mengubah mindset pembangunan



dimulai dari pinggiran. Wilayah 3T perlu dibangkitkan menjadi pusat-pusat baru pertumbuhan ekonomi, bukan hanya dari perkotaan yang segala fasilitas lebih siap. BBM 1 harga bukan hanya bentuk perwujudan keadilan, tetapi sekaligus menggerakkan ekonomi di wilayah 3T dan mengantisipasi kesenjangan wilayah 3T dengan perkotaan. Sehingga tidak ada lagi daerah-daerah yang termarginalkan," ujar Ifan, sapaan akrab Kepala BPH Migas.

Sejak instruksi Presiden RI Joko Widodo pada akhir Desember 2015 untuk melaksanakan Program BBM 1 Harga dan terbitnya Peraturan Menteri ESDM No. 36 Tahun 2016 sebagai

turunan amanah UU Migas, BPH Migas selalu konsisten mengawal Program BBM 1 Harga yang dicanangkan oleh Presiden Jokowi. BPH Migas telah berhasil mengawal pelaksanaan program BBM 1 Harga mulai Tahun 2017 hingga sekarang.

Kehadiran BBM 1 Harga sangat dinantikan oleh masyarakat, khususnya di wilayah 3T. Bahkan, antusiasme pemerintah kabupaten terhadap Program BBM 1 Harga sangat tinggi. Hal ini terlihat dari adanya usulan baru pembangunan penyalur BBM 1 Harga di 769 lokasi di luar target Pemerintah sebanyak 500 lokasi hingga tahun 2024. Usulan tersebut saat ini sedang dievaluasi oleh BPH Migas dan Kementerian ESDM. ★



Menteri ESDM Lantik Komite BPH Migas Periode 2021–2025



Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif melantik dan mengambil sumpah Ketua dan Anggota Komite BPH Migas periode 2021–2025 secara hybrid (online dan offline) di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Senin (09/08/2021). Dalam kesempatan sama, Menteri ESDM juga melantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Kementerian ESDM masa jabatan 2021–2025.

Komite BPH Migas yang dilantik adalah sebagai berikut:

1. Erika Retnowati, Ak., M.Si. dilantik sebagai Ketua merangkap Anggota Komite BPH Migas
2. Abdul Halim, S.Si. dilantik sebagai Anggota Komite BPH Migas
3. Ir. Basuki Trikora Putra dilantik sebagai Anggota Komite BPH Migas
4. Ir. Eman Salman Arief, M.B.A. dilantik sebagai Anggota Komite BPH Migas
5. Ir. Harya Adityawarman dilantik sebagai Anggota Komite BPH Migas
6. Iwan Prasetya Adhi, S.E. dilantik sebagai Anggota Komite BPH Migas
7. Dr. Ir. Saleh Abdurrahman, M.Sc. dilantik sebagai Anggota Komite BPH Migas
8. Wahyudi Anas, S.T. dilantik sebagai Anggota Komite BPH Migas
9. Yapit Sapta Putra, S.E., M.M. dilantik sebagai Anggota Komite BPH Migas



Pada pelantikan ini, Menteri ESDM menegaskan bahwa yang terpenting di masa pandemi Covid-19 ini adalah sense of crisis serta pentingnya untuk terus mengasah kepekaan terhadap situasi pandemi ini yang dimulai dengan meningkatkan good governance pada setiap langkah kerja dengan menjunjung tinggi nilai kejujuran, amanah, dan dengan prinsip efisiensi yang tinggi.

“Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2002, bahwa komite BPH Migas berasal dari tenaga profesional. Dengan terpilihnya saudara-saudara sebagai ketua dan anggota komite BPH Migas masa jabatan 2021–2025 yang diketuai serta merangkap anggota oleh saudari Erika Retnowati agar terus melakukan inovasi dan terobosan kebijakan, karena tantangan yang akan dihadapi oleh BPH Migas akan semakin besar.

Menurut Arifin, masih banyak hal yang menjadi tantangan BPH Migas ke depannya, seperti pendistribusian BBM ke seluruh wilayah NKRI dengan melibatkan UMKM, BUMD serta kelompok masyarakat lainnya karena saat ini baru sekitar 42,7% kecamatan yang memiliki penyalur BBM. Tantangan lainnya ialah melakukan monitoring dan evaluasi penyediaan cadangan operasional BBM serta perubahan lampiran Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, beserta peraturan pelaksanaannya. Regulasi terkait cadangan BBM nasional dalam rangka ketahanan energi serta perlu diatur penempatan tangki BBM milik badan usaha di kawasan Tertinggal, Terluar, dan Terdepan (3T) dan kawasan timur Indonesia juga

menjadi tantangan tersendiri.

Sedangkan di bidang gas bumi, Arifin mengingatkan bahwa BPH Migas perlu segera menyelesaikan Proyek Strategis Nasional, khususnya terkait dengan transmisi gas bumi; penetapan harga gas bumi rumah tangga dan pelanggan kecil; sinkronisasi perizinan dan hak khusus; dan isu-isu penting lainnya yang dalam penyelesaiannya memerlukan sinergi dengan instansi terkait.

Terakhir, Arifin berpesan, agar BPH Migas dapat terus melakukan perbaikan tata kelola dalam pengelolaan kegiatan hilir minyak dan gas bumi, termasuk di dalam lingkungan BPH Migas sendiri. ★



Komite BPH Migas Terima Kunjungan Direktur Utama Pertamina

Kepala BPH Migas Erika Retnowati beserta Komite dan Pejabat Tinggi Pratama BPH Migas menerima kunjungan Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati di Gedung BPH Migas, Jakarta, Senin (23/08/2021). Kunjungan ini dalam rangka Courtesy Call dan perkenalan dengan Komite BPH Migas yang baru.

Erika menyambut baik pertemuan dengan Direktur Utama Pertamina dan jajaran Direksi

Pertamina lainnya ini. Ia mengungkapkan bahwa semangat yang dibawa oleh Komite BPH Migas yang baru diharapkan dapat meningkatkan koordinasi yang sudah terjalin antara BPH Migas dan Pertamina serta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

"Saya berharap agar visi, misi, dan fungsi kita masing-masing bisa terjaga," tambah Erika.

Sementara itu pada kunjungan ini, Nicke Widyawati mengucapkan selamat atas dilantiknya Kepala serta Anggota Komite BPH Migas yang baru. Nicke juga memohon arahan dan juga koordinasi yang intens dengan BPH Migas yang sudah terjalin dengan baik dapat dipertahankan dan terus ditingkatkan.

"Tentu saja bagi kami sangat penting untuk melakukan koordinasi yang intens karena





beberapa hal tentu kami sangat memerlukan arahan dan dukungan dari BPH Migas,” katanya.

Nicke juga menyampaikan terima kasih atas dukungan BPH Migas terhadap program digitalisasi SPBU yang sudah diselesaikan dan juga program BBM 1 Harga.

Pada kesempatan tersebut, Erika Retnowati selain memperkenalkan dirinya sebagai Kepala BPH Migas yang baru juga memperkenalkan Anggota Komite BPH Migas, yaitu Abdul Halim, Basuki Trikora Putra, Eman Salman Arief, Harya Adityawarman, Iwan Prasetya Adhi, Saleh Abdurrahman, Wahyudi Anas, dan Yapit Sapta Putra. Erika Retnowati juga memperkenalkan Pejabat Tinggi Pratama BPH Migas, yaitu Sekretaris BPH Migas Yuli Rachwati, Direktur Gas Bumi Sentot Harijadi BTP, dan Direktur BBM Patuan Alfon S. ★



Kepala BPH Migas Serahkan Perubahan SK JBT dan JBKP Tahun 2018–2022



Kepala BPH Migas Erika Retnowati menyerahkan Perubahan Surat Keputusan (SK) Penerima Penugasan PT Pertamina (Persero) kepada PT Pertamina Patra Niaga selaku Pelaksana Penugasan Penyediaan dan Pendistribusian Jenis BBM Tertentu (JBT) dan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) Tahun 2018–2022 di Kantor BPH Migas, Jakarta Selatan, Selasa (31/08/2021). Perubahan SK tersebut diterima langsung oleh Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati dan Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga (SH Commercial & Trading) Alfian Nasution.

Perubahan SK itu mencakup SK Kepala BPH Migas Nomor 60/P3JBT/BPH MIGAS/KOM/2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 38/P3JBT/BPH MIGAS/KOM/2017 Tentang Penugasan Badan Usaha untuk Melaksanakan Penyediaan dan Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu Tahun 2018 Sampai Dengan Tahun 2022 dan SK Kepala BPH Migas Nomor 61/P3JBKP/BPH MIGAS/

KOM/2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 40/P3JBKP/BPH MIGAS/KOM/2017 tentang Penugasan PT Pertamina (Persero) untuk Melaksanakan Penyediaan dan Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan Tahun 2018 Sampai Dengan Tahun 2022.

Erika mengatakan, SK Perubahan Penugasan ini merupakan tindak lanjut terbitnya Peraturan Presiden No. 69 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres No.191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak yang berlaku sejak 3 Agustus 2021 lalu dan Surat Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nomor 343/C00000/2021-S0 tanggal 16 Agustus 2021 Perihal Pelaksanaan Penugasan Penyediaan dan Pendistribusian JBT & JBKP Sehubungan Restrukturisasi PT Pertamina (Persero). Pada surat terakhir, Pertamina mengusulkan pengalihan penugasan kepada anak perusahaannya, yakni PT Pertamina Patra Niaga sesuai

Pasal 8A Perpres No. 69 Tahun 2021. Erika menjelaskan bahwa keputusan ini ditetapkan melalui sidang Komite BPH Migas.

“Harapan kami kepada Pertamina, meski dilakukan oleh Pertamina Patra Niaga, tetap bertanggung jawab atas komitmennya,” ia menekankan.

Erika mengatakan, untuk tahun ini kuota Solar subsidi diberikan sebesar 15,58 juta kiloliter (kl), minyak tanah 500 ribu kl, dan Premium penugasan 10 juta kl. Erika berpesan agar Badan Usaha penerima penugasan dapat menyalurkan JBT dan JBKP ke konsumen yang berhak sehingga tepat sasaran.

“Setiap tiga bulan, BPH Migas melakukan evaluasi penyaluran JBT dan JBKP dan hasil evaluasi tersebut sebagai dasar BPH Migas untuk melakukan penyesuaian penugasan dan kuota penyalur triwulan berikutnya,” imbuhnya. ★



Kepala BPH Migas Tinjau Pendistribusian BBM dan LPG 3 kg di NTB

Kepala BPH Migas Erika Retnowati dan Anggota Komite BPH Migas Saleh Abdurrahman meninjau pendistribusian gas LPG 3 kg dan BBM pada Pertashop di beberapa lokasi di Nusa Tenggara Barat (NTB) pertengahan September lalu.

Sejumlah lokasi yang ditinjau antara lain Pangkalan LPG di Jalan Majapahit, Ampenan, Mataram; Pangkalan LPG Jalan Kota Tua, Ampenan, Mataram; dan Pertashop Jalan Lingsar, Narmada, Lombok Barat.

Dalam kunjungan tersebut Kepala BPH Migas dan Komite berinteraksi langsung kepada masyarakat sekitar perihal ketersediaan stok dan harga jual BBM serta harga gas LPG.

Salah satu Pertashop yang dikunjungi, yakni Pertashop 5P.83302 sudah beroperasi selama 10 bulan, memiliki tangki dengan kapasitas 3 kiloliter (kl), 1 dispenser, 1 nozzle, produk penjualan Pertamina dengan harga Rp9.000, dan rata-rata penjualan 800–900 liter sehari. Konsumen Pertashop ini adalah kendaraan bermotor.

Dalam kunjungan ke pangkalan LPG dan Pertashop, Kepala BPH Migas meminta Pertamina agar menjaga ketersediaan BBM

dan stok gas LPG untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

“Kami berharap pasokan LPG 3 kg ini selalu tersedia agar masyarakat yang membutuhkan tidak kesulitan untuk membelinya. Selain itu, kami juga berharap penyebaran Pertashop semakin luas sehingga masyarakat mudah untuk mendapatkan BBM, tidak perlu jauh-jauh mencarinya,” kata Erika.

Keesokan harinya, Erika dan Saleh Abdurrahman mengunjungi TBBM Ampenan di Jl. Yos Sudarso, Ampenan, Kota Mataram,

NTB. Kunjungannya ini untuk memastikan pasokan BBM aman untuk ajang World Superbike 2021 yang akan dihelat pada 13–14 November 2021.

Erika meminta Pertamina untuk menyiapkan pasokan BBM yang cukup serta infrastruktur penunjang yang mumpuni agar perhelatan Internasional ini sukses.

“Semoga acara Superbike ini berjalan sukses. Mohon untuk Pertamina agar lebih concern lagi untuk menyiapkan pasokan BBM yang diperlukan,” ungkap Erika. ★



BPH Migas Gelar Sosialisasi Kinerja dan Regulasi di Kota Solo



Kepala BPH Migas Erika Retnowati menghadiri Sosialisasi Kinerja dan Penyuluhan Regulasi BPH Migas Tahun Anggaran 2021 di Hotel Sunan, Solo, Jawa Tengah, Sabtu (04/09/2021). Acara tersebut juga dihadiri oleh antara lain Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Bambang Wuryanto, Anggota Komite BPH Migas Basuki Trikora Putra, dan perwakilan sejumlah stakeholder.

Dalam sambutannya, Erika menyampaikan, sesuai UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, BPH Migas memiliki fungsi melakukan pengawasan terhadap penyediaan dan pendistribusian BBM dan pengangkutan gas bumi melalui pipa serta melakukan pengaturan agar ketersediaan dan distribusi BBM dan gas bumi dapat terjamin di seluruh wilayah NKRI serta meningkatkan pemanfaatan gas bumi di dalam negeri.

Menurut Erika, kegiatan sosialisasi ini merupakan salah satu bentuk sinergitas BPH Migas dan DPR RI, khususnya Komisi VII, sebagai mitra kerja BPH Migas untuk lebih mengintensifkan dan mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat dan sekaligus meningkatkan iklim investasi.

“Semoga terselenggaranya sosialisasi ini dapat memberikan pencerahan dan menjadi sarana diskusi dan solusi dari setiap permasalahan di lapangan, terutama terkait penyediaan distribusi BBM,” ungkap Erika.

Lebih lanjut Erika mengemukakan, walaupun dalam keadaan pandemi Covid-19 seperti saat ini, BPH Migas tetap melaksanakan salah satu fungsinya, yaitu melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penyediaan pendistribusian BBM dan pengangkutan gas bumi melalui pipa dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan guna menjamin ketersediaan BBM bagi masyarakat. BPH Migas senantiasa memberikan pembinaan kepada Badan Usaha dan masyarakat melalui Focus Group Discussion (FGD), supervisi pembangunan penyalur BBM 1 harga, pengawasan lapangan melalui verifikasi dan uji petik serta sosialisasi tugas fungsi BPH Migas dan regulasi atau kebijakan di bidang hilir migas.

“Khusus pada hari ini, sosialisasi akan dilakukan yang terkait dengan Sub Penyalur BBM dan Surat Rekomendasi Pembelian Jenis BBM Tertentu (JBT) dan Jenis BBM

Khusus Penugasan (JBKP), yang merupakan salah satu upaya untuk memudahkan akses masyarakat dalam mendapatkan BBM dengan harga terjangkau,” jelas Erika.

Sementara itu, Bambang Wuryanto mengatakan, “BPH Migas inilah yang mengatur penyaluran BBM agar bisa merata di seluruh wilayah Indonesia. Jadi, tugas BPH Migas ialah mengatur dan mengawasi distribusi BBM dan gas bumi melalui pipa”.

Pada kesempatan sama, Basuki Trikora Putra memaparkan, kegiatan usaha hilir adalah kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha pengelolaan, pengangkutan, penyimpangan dan atau niaga. Tugas BPH Migas adalah mengatur dan menetapkan tarif pengangkutan gas bumi melalui pipa, harga gas bumi untuk rumah tangga dan usaha pelanggan kecil, perusahaan transmisi dan distribusi gas bumi, ketersediaan dan distribusi BBM, cadangan bahan bakar minyak nasional dan pemanfaatan fasilitas pengangkutan dan penyimpanan BBM. ★

Gandeng PGN, BPH Migas Uji Pasar Produk GasKita

Bekerja sama dengan Perusahaan Gas Negara (PGN), BPH Migas melakukan Uji Pasar Produk GasKita Program PGN Sayang Ibu di Malaka Sari, Jakarta Timur, Selasa (21/09/2021).

Kegiatan ini merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan target Satu Juta Sambungan Rumah (SR) per tahun sesuai

dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024. Hingga tahun 2024, ditargetkan terdapat lebih dari 4 juta SR.

“Acara di Malaka ini merupakan bagian dari upaya pencapaian target jargas rumah tangga 4 juta pelanggan,” ungkap Kepala BPH Migas Erika Retnowati dalam sambutannya.

Selain Erika, Uji Pasar Produk GasKita ini juga dihadiri oleh Komite BPH Migas Wahyudi Anas, Basuki Trikora Putra, Saleh Abdurrahman, Direktur Gas Bumi BPH Migas Sentot Harijady BTP, Direktur Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Migas Kementerian ESDM Noor Arifin Muhammad, dan Direktur Utama PGN M. Haryo Yuniarto. ★



Bahas Perkembangan Digitalisasi SPBU, BPH Migas-Telkom Gelar Pertemuan

Kepala BPH Migas Erika Retnowati bertemu dengan Direktur Enterprise & Business PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk Edi Witjara di Hotel Intercontinental Bandung, Jawa Barat, Rabu (22/09/21). Pada kesempatan tersebut, Telkom memaparkan

Downstream Monitoring and Supervision Room for Oil & Gas.

Salah satu topik Downstream Monitoring and Supervision Room for Oil & Gas yang dibahas adalah Program digitalisasi SPBU Pertamina.

Program ini merupakan kerja sama antara Telkom dan PT Pertamina (Persero). Program ini merupakan tindak lanjut dari Peraturan BPH Migas Nomor 6 Tahun 2013 tentang Penggunaan Sistem Teknologi Informasi dalam Penyaluran Bahan Bakar Minyak dan Surat Keputusan Kepala BPH Migas Nomor 38/P3JBT/BPH MIGAS/KOM/2017 tanggal 19 Desember 2017 tentang Penugasan Badan Usaha untuk Melaksanakan Penyediaan dan Pendistribusian Jenis BBM Tertentu Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2022. Dalam aturan itu, Badan Usaha Penugasan jenis BBM Tertentu wajib menyiapkan sistem teknologi informasi terpadu yang dapat merekam data konsumen dan volume penyaluran BBM untuk setiap konsumen secara online.

Hingga saat ini, program digitalisasi SPBU telah terpasang di 5.518 SPBU Reguler di seluruh Indonesia. Penggunaan digitalisasi SPBU diharapkan berfungsi sebagai alat pengawasan penyaluran Jenis BBM Tertentu (BBM Bersubsidi) dan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) berbasis IT agar tepat sasaran dan tepat volume serta meningkatkan akuntabilitas. ★



BPH Migas Adakan Sosialisasi Kinerja di Bantul



penyediaan dan pendistribusian BBM di Kabupaten Bantul, realisasi hingga 31 Agustus 2021 untuk Jenis BBM Tertentu (JBT) adalah 19.924,1 KL. Angka ini merupakan 42,02% dari kuota yang ditetapkan BPH Migas sebesar 47.415 KL. Sementara itu, untuk Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP), kuotanya sebesar 10.538,0 KL dan realisasinya sebesar 552,00 KL (5,24%).

Acara ini juga turut dihadiri oleh Anggota DPR RI Komisi VII Gandung Pardiman, Sekretaris BPH Migas Yuli Rachwati, Kapanewon Imogiri Slamet Santoso, dan SBM PT Pertamina (Persero) Area Yogyakarta Bastian Wibowo. Pada kesempatan sama, Gandung Pardiman mengapresiasi atas terselenggaranya acara sosialisasi ini.

"Komisi VII DPR RI, sebagai mitra kerja BPH Migas, sangat mengapresiasi sinergitas antara DPR RI dan BPH Migas dalam kegiatan sosialisasi yang mengedepankan intensitas komunikasi secara tatap muka dengan masyarakat Bantul untuk memastikan tugas dan fungsi BPH Migas berjalan dengan baik," ujar Gandung.

Kegiatan sosialisasi yang diikuti oleh masyarakat Bantul ini berlangsung secara kondusif dan antusias dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat. ★

Komite BPH Migas Wahyudi Anas menghadiri Penyuluhan Regulasi BPH Migas TA 2021 yang bertempat di Gandung Pardiman Center Imogiri, Kabupaten Bantul, Yogyakarta, Sabtu (02/10/2021). Acara ini bertujuan mengedukasi kegiatan hilir migas kepada masyarakat.

Dalam sambutannya, Wahyudi Anas mengungkapkan, kegiatan ini merupakan bentuk sinergi antara BPH Migas dan Komisi VII DPR RI. Tujuannya guna memberikan pemahaman dan edukasi kegiatan hilir migas kepada masyarakat secara langsung, terutama

penyediaan dan distribusi BBM, khususnya di wilayah Kabupaten Bantul.

"Acara ini merupakan optimalisasi pendekatan BPH Migas dengan masyarakat dalam rangka edukasi dan sarana diskusi masyarakat terkait penyaluran BBM Bersubsidi di Kabupaten Bantul," ungkap Wahyudi.

Pada acara ini juga dipaparkan Tugas dan Fungsi BPH Migas serta capaian Kinerja dan Penyuluhan Regulasi BPH Migas kepada masyarakat di Imogiri, Kabupaten Bantul. Berdasarkan monitoring pengawasan





BPH Migas Gelar Sosialisasi Kinerja di Brebes

Komite BPH Migas Abdul Halim dan Eman Salman Arief menghadiri Sosialisasi Kinerja dan Penyuluhan Regulasi BPH Migas TA 2021 yang bertempat di Balai Desa Karang Junti, Brebes, Jawa Tengah, Selasa (05/10/2021). Kegiatan tersebut merupakan rangkaian agenda Sinergitas BPH Migas dan DPR RI yang rutin digelar untuk memberikan edukasi dan pemahaman bagi masyarakat mengenai Tugas, Fungsi, dan Regulasi BPH Migas.

Hadir salam kesempatan tersebut Anggota DPR RI Komisi VII Paramitha Widya Kusuma dan SBM PT Pertamina (Persero) Hasanuddin Ritonga. Dalam sambutannya, Paramitha menjelaskan komitmen sinergitas antara BPH Migas dan DPR RI demi menjaga pengawasan dan pengaturan minyak dan gas bumi di Indonesia.

"BPH Migas memiliki peranan sentral dalam memastikan distribusi BBM dan gas bumi melalui pipa kepada masyarakat Indonesia," ujar Paramitha.

Pada kesempatan sama, Abdul Halim memaparkan mengenai tugas dan fungsi BPH Migas dalam menjamin pengawasan dan pengaturan ketersediaan BBM di seluruh wilayah Indonesia.

"BPH Migas merupakan badan yang bertugas berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku dengan melakukan pengawasan serta membuat regulasi mengenai kegiatan hilir Migas demi menjaga pasokan BBM di seluruh Indonesia," jelasnya.

Pasca kegiatan tersebut, Komite BPH Migas meninjau Pertashop Runggang, Losari, Brebes dalam dalam rangka monitoring BBM. ★

BPH Migas Sosialisasi Aturan Pembelian Solar di Palangkaraya

BPH Migas menggelar Sosialisasi Peraturan BPH Migas No. 17 Tahun 2019 tentang Penerbitan Surat Rekomendasi Pembelian Jenis BBM Tertentu (Minyak Solar) di Aquarius Boutique Hotel Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Sabtu (02/10/2021). Kegiatan Sosialisasi ini dihadiri oleh Komite BPH Migas Saleh Abdurrahman dan Eman Salman Arief, Executive General Manager Regional Kalimantan PT Pertamina (Persero) Freddy Anwar, perwakilan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah serta Anggota Komisi VII DPR RI Mukhtarudin secara Virtual.

Dalam paparannya, BPH Migas menegaskan bahwa dalam rangka melaksanakan Tugas dan Fungsinya yang diatur dalam UU No. 21 Tahun 2001, BPH Migas telah membuat Peraturan BPH Migas No. 17 Tahun 2019 tentang Penerbitan Surat Rekomendasi Pembelian Jenis BBM Tertentu yang menjadi Peraturan Pelaksana dari Perpres No. 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak sebagaimana telah diubah dengan Perpres Nomor 43 Tahun 2018.

Kegiatan Sosialisasi ini dilaksanakan untuk memberikan informasi kepada masyarakat agar pelaksanaan pendistribusian BBM, khususnya Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu (Minyak Solar) yang merupakan BBM bersubsidi tepat sasaran kepada konsumen yang berhak.

Pasca kegiatan tersebut, Komite BPH Migas meninjau Pertashop Runggang, Losari, Brebes dalam dalam rangka monitoring BBM. ★



Komite BPH Migas Pantau Ketersediaan dan Distribusi BBM di Palangkaraya

Komite BPH Migas Saleh Abdurrahman dan Eman Salman Arief berkunjung ke Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah dari tanggal 30 September 2021 sampai dengan 1 Oktober 2021. Kunjungan ini guna memantau langsung ketersediaan dan distribusi BBM di kota tersebut.

Kegiatan diawali dengan kunjungan ke DPPU PT Pertamina (Persero) Tjilik Riwut. Turut mendampingi Komite BPH Migas dalam kesempatan ini adalah SAM Pertamina Wilayah Kalselteng Drestanto Nandiwardhana dan Operation Head DPPU Pertamina Tjilik Riwut Jepmansyah. Jepmansyah pada kesempatan ini menjelaskan bahwa DPPU Tjilik Riwut mendapatkan suplai BBM dari TBBM Banjarmasin yang memiliki ketahanan sampai dengan 11 hari.

Keesokan harinya, Komite BPH Migas melanjutkan kunjungan kerja ke beberapa

tempat di antaranya Pertashop 6P.73101 di Kereng Bangkirai; Pertashop Kalampanan di Jl. Trans Kalimantan, Kecamatan Jabiren; dan Fuel Terminal Pulang Pisau yang berlokasi di Jl. Kampung Kalawa Lintas Bahaur, Kelurahan Kalawa, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau. Kali ini, Komite BPH Migas didampingi oleh Operation Head Fuel Terminal Pulang Pisau Agustinus Hermawan.

Dalam kunjungan tersebut, Agustinus menjelaskan bahwa Fuel Terminal Pulang Pisau mendapatkan suplai BBM/BBK dari Kapal ex. Fuel Terminal Kotabaru, RU V Balikpapan, dan STS Kotabaru dengan rata-rata penerimaan kapal adalah 7 call/bulan.

"Suplai bahan bakar di Fuel Terminal di Pulang Pisau antara lain mencakup Bahan Bakar jenis Premium, Kerosene, Biosolar, Pertamina, Dexlite, dan Peralite untuk didistribusikan di wilayah Kalimantan Tengah," pungkasnya. ★



Komite BPH Migas Kunjungi Terminal LNG Milik Pelindo Energi Logistik

Komite BPH Migas Wahyudi Anas, Abdul Halim, Basuki Trikora Putra, Harya Adityawarman, Iwan Prasetya Adhi, Saleh Abdurrahman, dan Direktur Gas Bumi mengunjungi Fasilitas Terminal Liquefied Natural Gas (LNG) milik PT Pelindo Energi Logistik (PT PEL) di kawasan Pelabuhan Benoa, Denpasar, Bali, Sabtu (09/10/2021). Kegiatan ini untuk mengetahui kegiatan pemanfaatan gas dari LNG langsung di lapangan.





Pastikan Ketersediaan BBM, Kepala BPH Migas Kunjungi TBBM Manggis

Dalam kunjungan kerja itu, rombongan disambut oleh Direktur Operasi, Teknik, dan Komersil PT PEL Wayan Mega Budiarta. Komite BPH Migas Wahyudi Anas menyampaikan, kegiatan ini bertujuan untuk memperoleh gambaran dan penjelasan terkait kegiatan dan operasional pemanfaatan gas dari LNG yang dilakukan oleh PT PEL untuk mendukung pembangkit listrik di Bali.

Pada kesempatan ini, Wayan menjelaskan terkait proses kegiatan bongkar muat LNG dari kapal carrier LNG ke fasilitas regasifikasi dan penyimpanan hasil regasifikasi hingga penyaluran gas hasil regasifikasi ke titik serah ke Pembangkit Listrik Pesanggaran. Terminal LNG Benoa merupakan terminal mini LNG pertama di Indonesia yang dibangun sejak tahun 2016 untuk mendukung pasokan energi ke Pembangkit Listrik Pesanggaran di Bali milik PT Indonesia Power. Kegiatan dilanjutkan dengan kunjungan ke fasilitas Floating Storage Regasification Unit (FSRU) dan Floating Regasification Unit (FRU) yang ada di Terminal LNG PT Pelindo. ★



Kepala BPH Migas Erika Retnowati dan Komite BPH Migas Eman Salman Arief bersama dengan Direktur BBM BPH Migas Patuan Alfion mengunjungi TBBM Manggis, Kabupaten Karangasem, Bali, Sabtu (09/10/2021). Kunjungan ini adalah salah satu bentuk implementasi tugas BPH Migas, yaitu melakukan pengawasan ketersediaan BBM di Indonesia.

Selain melakukan pengawasan di TBBM, BPH Migas juga menyempatkan waktu untuk melakukan pengawasan ketersediaan BBM di salah satu Pertashop di kawasan Klungkung dan berkesempatan

bertemu dengan konsumen Pertashop di sana. Di dalam kunjungannya ini, Erika menyampaikan harapannya bahwa BBM di kawasan Bali tetap aman jelang aktivitas yang mulai normal.

“Saya berharap bahwa BBM di kawasan Bali ini tetap tersedia bagi masyarakat di sini,” katanya.

Pada kegiatan ini, rombongan didampingi oleh Region Manager Retail Sales Jatimbalinus I Ketut Permadi Aryakumara dan Integrated Terminal Manager Manggis Samsul Alam. ★

Bahas Kuota JBT dan JBKP, Gubernur Bangka Belitung Kunjungi BPH Migas

Kepala BPH Migas Erika Retnowati beserta Anggota Komite BPH Migas menerima kunjungan kerja Gubernur Bangka Belitung (Babel) Erzaldi Rozman beserta jajarannya di kantor BPH Migas, Jakarta, Senin (11/10/2021). Kunjungan Gubernur Babel ini dalam rangka audiensi dengan Komite BPH Migas terkait rancangan usulan kuota Jenis BBM Tertentu (JBT) dan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) di Provinsi Bangka Belitung.

Erzaldi pada kesempatan tersebut mengungkapkan bahwa audiensi ini dilaksanakan karena adanya lonjakan konsumsi BBM di wilayah Babel dan adanya rencana pembangunan SPBN baru di sejumlah kepulauan di Babel agar BBM subsidi, khususnya Solar dapat menjangkau seluruh pulau yang ada.

"Kami berharap BPH Migas bisa memberikan kuota JBT dan JBKP yang cukup untuk masyarakat di Babel," ungkap Erzaldi.

Pada kesempatan sama, Erika Retnowati menyambut baik dan memberikan apresiasi kehadiran Gubernur Babel. "BPH Migas sangat mengapresiasi kepala daerah yang memiliki inisiatif untuk mengedepankan langkah-langkah audiensi demi kondusivitas distribusi BBM bersubsidi di wilayahnya," kata Erika. ★



Komite BPH Migas Kunjungi Integrated Terminal Surabaya



BPH MIGAS Gelar Sosialisasi Kinerja di Bangka Belitung

Komite BPH Migas Abdul Halim dan Yapit Sapta Putra menghadiri Sosialisasi Kinerja dan Penyuluhan Regulasi BPH Migas TA 2021 yang bertempat di Tanjung Pesona Resort,

Bangka Belitung, Rabu (13/10/2021). Acara ini merupakan optimalisasi pendekatan BPH Migas dengan masyarakat dalam rangka edukasi dan sarana diskusi masyarakat terkait penyaluran BBM.

Yapit Sapta Putra dalam sambutannya menyampaikan, kegiatan sosialisasi ini merupakan bentuk sinergitas antara BPH Migas dan DPR RI dalam rangka pengaturan dan pengawasan ketersediaan BBM khususnya di Propinsi Bangka Belitung.

“Sosialisasi ini merupakan salah satu cara optimalisasi pendekatan BPH Migas dengan masyarakat dalam rangka edukasi dan sarana diskusi masyarakat terkait penyaluran BBM bersubsidi di Kota Pangkal Pinang, Bangka Belitung,” ujar Yapit.

Turut hadir dalam kesempatan tersebut Anggota Komisi VII DPR RI Bambang Patijaya, Anggota dan Sales Branch Manager Rayon V Sumsel Babel Satriyo Wibowo Wicaksono. Pada kegiatan ini, Bambang Patijaya menyampaikan apresiasi atas dilaksanakannya sosialisasi BPH Migas.

“Kami sangat mengapresiasi kegiatan sosialisasi ini, di mana kegiatan ini adalah salah satu bentuk menampung aspirasi, informasi, dan memberikan solusi atas keluhan masyarakat terkait BBM yang ada di daerah Pangkal Pinang,” ungkap Bambang.

Dalam acara tersebut, Abdul Halim memberikan paparan Tugas dan Fungsi BPH Migas serta capaian Kinerja dan Regulasi BPH Migas kepada masyarakat di Pangkal Pinang dan sekitarnya. Dari data monitoring penyediaan dan distribusi BBM yang ada di BPH Migas, untuk Kota Pangkal Pinang, kuota Jenis BBM Tertentu (JBT)/Solar subsidi tahun 2021 sebesar 24.700 KL dan realisasinya hingga Agustus sebesar 16.501 KL (67%). Sedangkan untuk Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) atau Premium penugasan dari kuota sebesar 12.772 KL, realisasinya hingga Agustus sebesar 3.656 KL (29%). ★



Komite BPH Migas Saleh Abdurrahman dan Eman Salman Arief bersama dengan Tim BPH Migas melakukan Kunjungan Kerja ke Integrated Terminal Surabaya, Kota Surabaya, Jawa Timur, Sabtu (16/10/2021).

Dalam kunjungan tersebut, rombongan BPH Migas diterima langsung oleh Integrated Terminal Manager Basuki Santoso yang didampingi oleh SAM PT Pertamina (Persero) I Ketut Pærmadi beserta dengan Tim SBM Pertamina.

“Integrated Terminal Surabaya mendapatkan suplai BBM/BBK dari Fuel Terminal Tuban dengan pipeline dan kapal. Rata-rata penerimaan kapal adalah 30 call/bulan,” papar Basuki.

Lebih jauh lagi Basuki menjelaskan mengenai wilayah distribusi, rata-rata suplai per bulan serta fasilitas penyimpanan BBM yang ada di Integrated Terminal Surabaya kepada rombongan Komite BPH Migas.

Setelah itu, rombongan BPH Migas melanjutkan kegiatan untuk memantau Control Room Integrated Terminal Surabaya guna melihat sistem pemantauan ketersediaan stok BBM pada tiap-tiap tangki.

“BPH Migas rutin melakukan kegiatan kunjungan kerja seperti ini untuk menjalankan tugas dan fungsi BPH Migas untuk melakukan pengawasan distribusi BBM di seluruh wilayah Indonesia,” ungkap Saleh. ★



Pantau BBM Langka, Komite BPH Migas Kunjungi Bangka Belitung

Komite BPH Migas Abdul Halim dan Yapit Sapta Putra mengunjungi Provinsi Bangka Belitung (Babel) dalam rangka penanggulangan kelangkaan BBM di provinsi tersebut, Kamis (14/10/2021). Kunjungan Kerja tersebut diterima langsung oleh Wakil Gubernur Babel Abdul Fatah beserta jajaran Perangkat Daerah terkait di Ruang Rapat Wakil Gubernur Babel. Turut hadir dalam pertemuan tersebut Sales Branch Manager Rayon V Sumsel Babel PT Pertamina (Persero) Satriyo Wibowo Wicaksono.

Kunjungan Komite BPH Migas ini merupakan tindak lanjut audiensi yang dilakukan oleh Gubernur Babel Erzaldi Rozman di Kantor BPH Migas pada Senin (11/10/2021) yang mengeluhkan adanya kelangkaan BBM di Provinsi Babel, khususnya di Pulau Belitung.

“Kondisi langkanya BBM kerap terjadi berulang kali di Babel karena masyarakat berlomba-lomba mendapatkan bensin. Jika dalam kondisi normal-normal saja dan hanya digunakan untuk moda transportasi atau nelayan jarang terjadi kelangkaan pada masa tersebut. Namun saat ini karena adanya kenaikan nilai ekonomi timah, menjadi pemantik masyarakat untuk menambang timah, sehingga terjadi kenaikan kebutuhan BBM,” ungkap Abdul Fatah.

Abdul Halim sangat menyambut baik langkah-langkah audiensi dan koordinasi yang dilakukan oleh Pemprov Babel dalam usahanya untuk menanggulangi kelangkaan BBM di provinsinya dan tentunya BPH Migas telah melakukan upaya-upaya untuk membantu Pemprov Babel dengan melakukan diskusi intensif dengan Hiswana

Migas dan Pertamina terkait dengan hal tersebut.

Abdul Halim menawarkan dua solusi bagi pemerintah daerah, khususnya Babel, untuk mengatasi kelangkaan BBM. Dikarenakan untuk penambahan kuota BBM, khususnya JBT akan sulit untuk terealisasi dalam waktu dekat, maka langkah yang pertama dengan sistem saling bahu-membahu antarkabupaten/kota yang masih dalam satu wilayah provinsi untuk menutupi kebutuhan wilayah yang terjadi kelangkaan.

“Mengimbangkannya bagaimana? Di sini kami mencoba mengutak-atik yang selama ini kuota diatur sampai ke SPBU, selagi masih dalam satu provinsi, bisa diasiati kalau di sini kurang, back-up dari yang lain. Kecuali beda provinsi, itu tidak bisa,” ungkapnya.



Solusi kedua, menurut Abdul Halim, yakni dengan menggaet pihak ketiga sebagai penyuplai BBM non subsidi. Sehingga, ketersediaan BBM tidak hanya terpusat pada ketersediaan yang ada di Pertamina, melainkan dapat diperoleh dari Badan Usaha lain. Namun, hal ini dapat berjalan dengan syarat dan ketentuan yang sudah diatur.

Menanggapi penjelasan dan solusi yang ditawarkan BPH Migas, Abdul Fatah sangat mengapresiasi langkah tindak lanjut dari BPH Migas dan telah memahami apa yang harus dilakukan oleh pihaknya ke depan dalam upaya penyelesaian kelangkaan BBM di wilayah Babel.

"Pak Halim bersama-sama kami mencoba melihat kondisi itu, hal-hal apa yang harus dilakukan. Saya menjadi paham yang harus dilakukan melalui jalur-jalur formal yang menjadi kebijakan nasional. Tapi, ada juga jalur-jalur lain yang tidak terikat dalam tataran subsidi, yaitu BBM Non subsidi yang dengan bebas melakukan niaga untuk kebutuhan BBM," pungkas Abdul Fatah.

Pada hari yang sama, Abdul Halim dan Yapit Sapta Putra juga mengunjungi TBBM Pangkal Balam, Kota Pangkalpinang, Kepulauan Bangka Belitung. Kunjungan ini didampingi oleh Sales Branch Manager Pertamina Babel Satriyo Wibowo Wicaksono dan Operation Head TBBM Pangkal Balam Rezky Kurniawan. Kunjungan ini dalam rangka melakukan

implementasi tugas dan fungsi BPH Migas untuk melakukan pengawasan ketersediaan BBM di seluruh wilayah Indonesia, khususnya Provinsi Babel.

Dalam kunjungannya BPH Migas mendapatkan paparan tentang data ketersediaan BBM beserta prosedur operasional di TBBM Pangkal Balam untuk mencocokkan dengan laporan Gubernur Babel terkait dengan kelangkaan BBM di Babel.

"Kuota ketersediaan BBM, khususnya Jenis BBM Umum atau JBU di TBBM Pangkal Balam Kota Pangkalpinang ini saya kira perlu ditingkatkan lagi untuk menjamin distribusi yang merata karena adanya lonjakan permintaan dari masyarakat guna membantu Pemerintah menanggulangi kejadian langkanya ketersediaan BBM di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung," ucap Abdul Halim. ★



BPH Migas Gelar **Sosialisasi Kinerja** di Sukabumi



Komite BPH Migas Iwan Prasetya Adhi menghadiri Sosialisasi Kinerja dan Penyuluhan Regulasi BPH Migas TA 2021 yang merupakan sinergi dengan Komisi VII DPR RI di Sukabumi, Jawa Barat, Sabtu (16/10/2021).

"Kegiatan ini merupakan salah satu sinergi antara BPH Migas dan DPR RI khususnya komisi VII, sehingga tugas dan fungsi sebagai pengawas distribusi BBM dapat berjalan dengan baik begitu pula DPR dengan konstituennya. Ketersediaan BBM untuk masyarakat menjadi prioritas," jelas Iwan Prasetya Adhi saat memberikan sambutan.

Sosialisasi ini juga dihadiri oleh Komite BPH Migas Wahyudi Anas, Anggota DPR Komisi VII Ribka Tjiptaning Proletariyati, dan Executive General Manager Jawa Bagian Barat PT Pertamina (Persero) Waljiyanto.

BPH Migas sebagai badan pengatur dan pengawas BBM senantiasa mendukung program pengembangan penyediaan BBM semakin dekat dengan masyarakat sehingga bisa memberikan efisiensi dan kecepatan dalam pelayanan pada masyarakat.

"Lebih dekat lebih baik, sehingga masyarakat mudah mendapatkan jenis BBM yang lebih ramah lingkungan serta menyesuaikan teknologi kendaraan bermotor saat ini yg membutuhkan jenis BBM Pertamina dan Pertamina Dex," ungkap Wahyudi Anas. Untuk mendekatkan ketersediaan BBM kepada masyarakat, khususnya jenis Pertamina dan Pertamina Dex, Pertamina memberikan program kemitraan dengan masyarakat melalui Pertashop.

"Pertashop menjadi salah satu solusi untuk ketersediaan BBM kepada masyarakat di mana

sebelumnya ada jarak antar SPBU kurang lebih 25 km, dengan Pertashop cukup berjarak 5 km, ini sangat memudahkan masyarakat," kata Waljiyanto.

Sementara itu, Ribka Tjiptaning menyampaikan animo keingintahuan masyarakat terhadap Pertashop cukup banyak.

Setelah kegiatan sosialisasi, Wahyudi Anas didampingi Sales Branch Manager Pertamina Bagus Septiardi melakukan monitoring ketersediaan BBM di Kota Sukabumi di antaranya ke SPBU 34.431.16 Kibodas, Ciaul Sukabumi dan Pertashop 3P43124. Berdasarkan peninjauan lapangan, dipastikan stok dan penyaluran BBM di Kabupaten dan Kota Sukabumi masih mencukupi dan aman untuk melayani masyarakat. ★



BPH Migas Sosialisasikan Kinerja dan Penyuluhan Regulasi di Medan



Komite BPH Migas Saleh Abdurrahman dan Yapit Sapta Putra menghadiri Sosialisasi Kinerja dan Penyuluhan Regulasi BPH Migas TA 2021 di Hotel Grand City, Medan, Sumatera Utara, Rabu (20/10/2021). Kegiatan ini merupakan salah satu bentuk sinergitas antara DPR RI dan BPH Migas.

Acara tersebut juga dihardiri oleh Anggota DPR RI Komisi VII Abdul Wahab Dalimunthe secara virtual. Dalam sambutannya, Abdul Wahab Dalimunthe menyampaikan, kesempatan ini adalah cara untuk berinteraksi kepada BPH Migas untuk mengetahui keadaan daerah masing masing perihal BBM, seperti jatah BBM dan penyelewengan BBM serta mengetahui jalan keluar dari permasalahan yang ada.

"Saya harap selesai acara ini, masyarakat di Kota Medan dapat terjawab segala pertanyaannya dan menjadi tahu sama tahu

jalan keluarnya sehingga masalah yang ada di sini dapat terselesaikan. Maka dari itu, acara seperti ini sangatlah penting untuk edukasi masyarakat luas," ujar Abdul Wahab.

Pada kesempatan sama, Saleh Abdurrahman menyampaikan, dalam beberapa minggu terakhir ini ada dua perkembangan penting dalam dinamika energi global maupun nasional. Pertama adalah krisis energi yang melanda negara-negara di Eropa menyusul tingginya harga gas dan batubara yang akhirnya juga mempengaruhi harga minyak bumi dunia. Kondisi krisis ini perlu dicermati dengan baik agar tidak mempengaruhi supply-demand energi dalam negeri. Khusus untuk migas, Indonesia masih mengimpor minyak mentah dan produk minyak, seperti Premium dan Pertamina untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.

"Kita (BPH Migas) akan terus melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan

penyediaan dan pendistribusian BBM dan pengangkutan gas bumi melalui pipa, serta kita akan terus menjamin ketersediaan dan distribusi bahan bakar minyak dan gas bumi yang ditetapkan Pemerintah dapat terjamin di seluruh wilayah NKRI serta meningkatkan pemanfaatan gas bumi di dalam negeri," kata Saleh.

Sementara itu, Yapit Sapta Putra dalam paparannya menjelaskan tugas BPH Migas antara lain:

1. Menetapkan penyediaan dan pendistribusian BBM;
2. Menetapkan cadangan BBM nasional;
3. Menetapkan kemanfaatan fasilitas bersama pengangkutan dan penyimpanan BBM.
4. Penetapan perusahaan transmisi dan distribusi gas bumi;
5. Penetapan tarif pengangkutan gas bumi melalui pipa;
6. Penetapan harga jaringan gas bumi ★



BPH Migas Adakan

Sosialisasi Kinerja di Palembang

Komite BPH Migas Abdul Halim dan Wahyudi Anas menghadiri Sosialisasi Kinerja dan Penyuluhan Regulasi BPH Migas TA 2021 yang bertempat di Ballroom Hotel Novotel Kota Palembang, Sumatera Selatan, Rabu (20/10/2021). Hadir pula dalam acara tersebut Anggota Komisi VII DPR RI Yulian Gunhar dan Executive GM Regional Sumbagsel PT Pertamina (Persero) Rama Suhut Sinaga.

Dalam sambutannya, Wahyudi Anas menekankan bahwa tugas dan fungsi BPH Migas adalah mengawasi pendistribusian BBM dan Gas Bumi di seluruh wilayah Indonesia.

"Kami (BPH Migas) meyakini bahwa acara sosialisasi ini merupakan wadah yang baik untuk memberikan edukasi terkait peran BPH

Migas dalam kegiatan hilir minyak dan gas bumi di Indonesia, khususnya di wilayah Kota Palembang," tuturnya.

Sementara itu, Yulian Gunhar menyambut baik pelaksanaan sosialisasi BPH Migas di Palembang. Menurutnya, masyarakat di Palembang perlu mengetahui tugas dan fungsi BPH Migas. Ketika ada persoalan terkait distribusi BBM dan gas bumi, maka masyarakat dapat menyampaikan laporan sehingga bisa segera ditindaklanjuti.

"Hari ini kita mendapat pencerahan dan edukasi dari para narasumber, baik dari BPH Migas maupun Pertamina. Kalau sebelumnya belum paham, sekarang kita jadi tahu kalau LPG langka mesti ke mana, kalau antrian panjang mengisi BBM mesti

lapor kemana. Jadi, tujuannya masyarakat di Sumatera Selatan tersambung antara yang memberikan amanah dan yang diberi amanah," jelas Gunhar.

Selanjutnya, dalam sesi paparan BPH Migas yang dibawakan oleh Abdul Halim ditegaskan bahwa usaha-usaha yang dilakukan BPH Migas dalam menjalankan tugas dan fungsinya tidak lain adalah untuk mengakomodir kepentingan semua pihak.

"Setiap langkah-langkah yang kami ambil sebagai badan regulator dan pengawas selalu sedemikian rupa mengakomodir kepentingan tiga pilar, yaitu Pemerintah, Badan Usaha, dan Masyarakat," tegasnya. ★

Kepala BPH Migas Kunjungi Pertamina Integrated Command Center

Kepala BPH Migas Erika Retnowati mengunjungi Pertamina Integrated Command Center (PICC) di Gedung Pertamina, Jakarta, Kamis (14/10/2021). Dalam kunjungan kerja itu, Kepala BPH Migas diterima oleh Direktur Penunjang Bisnis Pertamina Dedi Sunardi,

Direktur Pemasaran Regional Pertamina Patra Niaga Jumali, dan Corporate Secretary Pertamina Brahmantya S.

Kunjungan ini dalam rangka monitoring pelaksanaan sistem pengusahaan hilir bahan bakar minyak dan digitalisasi SPBU

Pertamina. Pada kesempatan tersebut, hadir pula anggota Komite BPH Migas di antaranya Basuki Trikora Putra, Harya Adityawarman, Wahyudi Anas, dan Direktur Bahan Bakar Minyak Patuan Alfon S beserta jajarannya. ★



Perkuat Pengawasan Pendistribusian BBM dan Gas Bumi Melalui Pipa, **BPH Migas Siap Bersinergi dengan BAIS TNI**



Kepala BPH Migas Erika Retnowati mengunjungi kantor Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI, Selasa (19/10/2021). Kunjungan kerja ini dalam rangka kerja sama pengawasan pendistribusian BBM dan gas bumi melalui pipa.

Kepala BPH Migas dan rombongan diterima langsung oleh Kepala BAIS Letjen TNI Joni Supriyanto. Pada kesempatan ini, Erika Retnowati menyampaikan harapannya agar terlaksana sinergitas antara BPH Migas dan BAIS TNI terkait pengawasan bersama di mana banyak terjadi penyimpangan-

penyimpangan penggunaan dan pendistribusian BBM maupun gas bumi melalui pipa.

Kepala BAIS TNI Letjen TNI Joni Supriyanto menegaskan siap bekerja sama dengan BPH Migas dalam mengurai penyimpangan-penyimpangan yang ada.

"Silakan, sampaikan saja kepada kami informasi terkait indikasi penyimpangan tersebut," katanya.

Sebagai penyuplai analisis-analisis intelijen dan strategis yang aktual maupun

proyeksi ke depan kepada Panglima TNI dan Kementerian Pertahanan, sinergitas BPH Migas dan BAIS TNI diyakini dapat mengurai berbagai penyimpangan dalam pendistribusian BBM subsidi dan gas bumi melalui pipa. Terlebih, teknologi IT juga bagian dari ranah lingkup yang dikerjakan BAIS.

Hadir pula dalam pertemuan tersebut Anggota Komite BPH Migas Basuki Trikora Putra, Harya Adityawarman, Iwan Prasetya Adhi, Wakil Kepala BAIS TNI Mayjen TNI Achmad Riad, dan Sekretaris BAIS TNI Marsda TNI Jemi Trisonjaya.

BPH Migas Gelar Temu Komite



BPH Migas menggelar kegiatan Temu Komite antara Komite BPH Migas Periode 2021–2025 dan Komite BPH Migas Periode 2017–2021 yang bertempat di Ballroom Hotel Santika Teraskota, Tangerang, Sabtu (23/10/2021).

“Saya berharap temu komite menjadi ajang silaturahmi. Saya juga berterima kasih

untuk Komite Periode 2017–2021 yang menyempatkan hadir pada acara ini,” ujar Kepala BPH Migas Erika Retnowati.

Kegiatan yang berlangsung penuh keakraban ini dihadiri oleh antara lain Komite BPH Migas Periode 2021–2025, Komite BPH Migas Periode 2017–2021, dan Pejabat Tinggi Pratama serta karyawan BPH Migas.





Badan Pengatur Hilir Migas Menjamin Distribusi Bahan Bakar Minyak Hingga ke Pelosok Negeri...

Visi

Terwujudnya penyediaan dan pendistribusian BBM di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan meningkatnya pemanfaatan Gas Bumi di dalam negeri melalui persaingan usaha yang wajar, sehat, dan transparan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat

Misi

Melakukan pengaturan dan pengawasan secara independen dan transparan atas pelaksanaan kegiatan usaha penyediaan dan pendistribusian BBM dan peningkatan pemanfaatan Gas Bumi di dalam negeri



Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi
www.bphmigas.go.id